TokohINDONESIA.com

■ Edisi 42 | November 2016

HAKI: D00-02-2395 | ISSN: 1908-9788

TOKOH.ID

Politisi Terhebat Indonesia Masa Kini

NEWS REVIEW

Rahim Reformasi

PERSPEKTIF

PDIP: Partai Ideologi Pancasila

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

SANG NEGARAWAN, THE GREAT QUEEN MAKER

BASUKI-DJAROT

Jakarta Baru

2

Kerja

TokohINDONESIA.com
The Journalistic Biography

Pemimpin Umum
Ch. Robin Simanullang

Pemimpin Redaksi
Ch. Robin Simanullang

Redaktur Eksekutif
Mangatur L Paniroy

Sekretaris Redaksi
Bantu Hotsan

Redaktur
Dian Gina Rahayu, Marjuka Situmorang, Sahbuddin Hamzah, Imam Sumarsono, Ade Wiharyana

Staf Redaksi
Dharma Leksana, Rukmana Rafli, Sastra Suganda, Boy Yapto

Kontributor
Anis Fuadi, Ramlo Hutabarat, Samsuri, Al Amin

Artistik
Esero Design

Fotografer
Fiesta Image

Pemimpin Usaha
Adur Nursinta Purba

Iklan dan Promosi
Dian Gina Rahayu

Sertifikat Merek
Ditjen HAKI Dephukham Agno: D00-02-2395

ISSN: 1908-9788

Penerbit
PT ASASIRA

Rekening
BRI Cabang Jatinegara, Jakarta
No.Rek 012201000902307

Alamat
Jalan Buni No.36, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450
Tel: +6221 - 86907690
Fax: +6221 - 86901951

E-mail:
redaksi@tokohindonesia.com

Website
www.tokohindonesia.com
tokoh.id | tokoh.in | tokoh.co

Harga:
Rp.32.500,-

Catatan Redaksi

Politisi Negarawan 05

Tokoh.Id

Politisi Terhebat Indonesia Masa Kini

Dr (HC). Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima RI (2001-2004) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1993-2020) adalah politisi terhebat Indonesia masa kini. Politisi paling berpengaruh dalam dua dasawarsa terakhir. Dia politisi pejuang terdepan (terhebat) mempertahankan Pancasila di saat politisi lain bersikap ambivalen. Pemimpin politik paling berhasil melahirkan kader-kader pemimpin bangsa 06

- Rahim Gerakan Reformasi 18
- Jalan Hidup Megawati 24
- Presiden RI Ke-5, Pemimpin Berkarakter 36
- Simbol Kesetaraan Jender 42

News Review

Sang Negarawan, The Great Queen Maker

Kiprah politik Megawati Soekarnoputri telah membuktikan dirinya sebagai negarawan. Kenegarawanannya makin bercahaya terang benderang saat dengan legowo menempatkan dirinya sebagai Queen Maker dalam pentas politik nasional, terutama dalam Pilpres 2014 50

Petugas Partai Ideologis

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa semua kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif maupun di struktur partai di semua tingkatan adalah petugas partai 59

Perspektif

PDI-P Partai Ideologis

Megawati Politisi Pancasila 63

Penulis: *Ch. Robin Simanullang*
Peliput/Riset: *Mangatur L. Paniroy, Bantu Hotsan, Rukmana Rafli, Boy Yapto*
Disain Sampul*: Tian Son Lang*
Foto Sampul: *PDIP*

TokohINDONESIA

Majalah Visi dan Biografi
Pertama dan Satu-satunya
di Indonesia

www.tokohindonesia.com
THE EXPERIENCE SITE

The Excellent Biography

Politisi Negarawan

TokohIndonesia.com pada edisi ini menampilkan sosok politisi terhebat Indonesia masa kini: Megawati Soekarnoputri, Presiden RI Kelima dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

Dia politisi paling berpengaruh dan terhebat serta menjadi icon negarawan Indonesia masa kini. Politisi pejuang terhebat (konsisten) mempertahankan Pancasila di saat politisi lain bersikap ambivalen. Kiprah politiknya telah membuktikan dirinya sebagai negarawan. Kenegarawanannya makin terang benderang saat dengan legowo memosisikan dirinya sebagai *Queen Maker* dalam pentas politik nasional Pilpres 2014.

TokohIndonesia. com mencatat empat sikap dan tindak politik hebat Megawati yang membuktikan dirinya negarawan.

Pertama, kendati sedemikian kejam tekanan politik penguasa Orde Baru, yang diterima Bung Karno dan keluarganya terutama dirinya sendiri, Megawati sama sekali tidak pernah menghujat Pak Harto apalagi balas dendam. Dia tidak menghendaki terjadi siklus kebencian dan balas dendam. Dia lebih mementingkan masa depan bangsa dengan meletakkan fondasi dasar pembangunan yakni *"nation and character building"* yang diwariskan Bung Karno.

Kedua, kendati dia (PDI dan PDI Perjuangan) mengalami tekanan politik yang berpuncak pada Kasus 27 Juli 2006 (Kudatuli), Megawati juga tidak membalas kebencian dan dendam. Bahkan, sangat mengejutkan tatkala dia (PDI Perjuangan) justru mencalonkan kembali Sutiyoso (Pangdam Jaya ketika Kudatuli terjadi) untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta periode kedua (2002-2007). "Ini bukan masalah kepentingan partai, tapi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa," kata Megawati.

Ketiga, Megawati ketika menjabat Presiden RI sama sekali tidak membawa gerbong PDI-P ke Istana. Dia lebih memilih birokrat berpengalaman menjabat Menteri Sekretaris Negara. Sama sekali tidak ada jabatan penting yang dipegang PDI-P di lingkungan Istana. Kendati sesungguhnya, membawa kader-kader terbaik partainya ke istana adalah hal yang sepantasnya. Tapi dia memiliki pertimbangan di atas nilai kepantasan itu.

Keempat, pemberian mandat (penugasan partai) kepada Jokowi untuk mengemban amanat rakyat menjadi Presiden Ketujuh. PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2014 tidak mencalonkan ketua umumnya sendiri, tetapi Sang Ketua Umum menyerahkan mahkota itu kepada kader terbaiknya, Jokowi. Dia, *The Great Queen Maker*, Sang Negarawan Indonesia masa kini.

■ **Ch. Robin Simanullang**

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Politisi Terhebat Indonesia Masa Kini

Dr (HC). Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima RI (2001-2004) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1993-2020) adalah politisi terhebat Indonesia masa kini. Politisi paling berpengaruh dalam tiga dasawarsa terakhir. Seorang politisi berkarakter dan berkepribadian kuat. Politisi paling teruji dan tangguh dalam tekanan politik dan paling teguh dalam prinsip perjuangan ideologis (Pancasila) masa kini. Dari rahim perjuangannyalah lahir gerakan reformasi di Indonesia. Dia politisi pejuang terdepan (terhebat) mempertahankan Pancasila di saat politisi lain bersikap ambivalen. Pemimpin politik paling berhasil melahirkan kader-kader pemimpin bangsa: *The Great Queen Maker*. Dia politisi paling berpengaruh dan terhebat serta menjadi icon negarawan Indonesia masa kini.

Penulis: Drs. Ch. Robin Simanullang

Redaksi ***TokohIndonesia.com*** menggoreskan apresiasi tersebut setelah mencermati jejak rekam puteri Bung Karno yang akrab dipanggil Ibu Mega, Mbak Mega dan Mbak Ega, kelahiran Yogyakarta, 23 Januari 1947 tersebut, dalam pusaran politik Indonesia masa kini, sejak prareformasi (1993) hingga saat ini (pascareformasi). Dia pemimpin (pelaku utama) politik yang paling konsisten dalam percaturan politik Indonesia masa kini. Dia menjadi pusat pusaran (epicentrum) politik, yang menjadi pusat perhatian dan sasaran, yang (suka atau tidak) mesti diperhitungkan dan diakui oleh kawan maupun lawan politiknya. Rekam jejaknya menunjukkan dia politisi terhebat Indonesia masa kini.

Maka sangat pantas kiprahnya yang demikian hebat dalam panggung politik telah diapresiasi empat perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri dengan menganugerahi Megawati empat penghargaan akademik gelar doktor honoris causa. Dari dalam negeri, Universitas Padjadjaran (2016) menganugerahkan gelar doktor honoris causa bidang politik dan pemerintahan. Sebelumnya, Megawati telah mem-

:: unpad.ac.id

Megawati dianugeragi gelar Doktor Honoris Causa bidang politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Bandung

:: tempo.co

Selain dari Unpad, Megawati telah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari tiga universitas ternama luar negeri yakni bidang Hukum dari Waseda University, Tokyo, Jepang (2001), bidang Politik dari Moscow State Institute of International Relations, Rusia (2003), dan bidang Politik dari Korea Maritime and Ocean University, Korea Selatan (2015)

peroleh gelar Doktor Honoris Causa bidang Hukum dari Waseda University, Tokyo, Jepang (2001), bidang Politik dari Moscow State Institute of International Relations, Rusia (2003), dan bidang Politik dari Korea Maritime and Ocean University, Korea Selatan (2015).

Sang Ibu yang menjadi politisi ini juga telah menerima penghargaan *Long Time Achievement* di bidang politik dari *International Conference of Asian Political Parties (ICAPP)* di Phnom Penh, Kamboja, Kamis, 2 Desember 2010. ICAPP yang diikuti 85 partai politik dari lebih 35 negara di Asia itu menilai Megawati sebagai pemimpin politik yang tangguh dan kuat (*tough and strong political leader*). Dia dinilai sukses memimpin transisi kepemimpinan secara demokratis di Indonesia melalui pemilihan presiden secara langsung, demokratis dan aman.

:: pdip.doc

Prananda Prabowo, Megawati, Puan Maharani dan Taufik Kiemas (Alm) dalam kegiatan PDI Perjuangan

Megawati juga pernah diposisikan

:: pdip.doc

Megawati Soekarnoputri di hadapan massa pendukung dan simpatisan PDI Perjuangan yang militan.

Majalah Forbes (2004) sebagai perempuan kedelapan terkuat dari 100 wanita terkuat dunia. Dia sejajar dengan perempuan pemimpin berkelas dunia lainnya, seperti Sonia Gandhi (India) urutan ketiga, dibawahnya, Presiden Filipina Gloria Arroyo (9), Perdana Menteri Banglades Begum Khaleda Zia (14), Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher (21), Presiden Sri Lanka Chandrika Kumaratunga (44), dan pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi (45).

Pengakuan ini menggambarkan realitas perjuangan dan kepemimpinan Megawati sangat kuat di mata dunia. Dia pemimpin berkelas dunia. Perhatian dunia mulai tertuju padanya terutama sejak ia berani terjun ke dunia politik saat hak-hak politik, terutama yang berkaitan dengan Bung Karno, di negeri ini masih terkekang oleh penguasa orde baru.

Tetapi dengan caranya sendiri, Megawati yang pendiam (tak banyak bicara) itu berani meretas jalan demokrasi dan reformasi saat tokoh-tokoh lainnya (laki atau perempuan) seperti tak punya nyali berhadapan dengan Pak Harto, penguasa Orde Baru selama 32 tahun.

Realitas empirik membuktikan, Megawati yang memiliki kharisma sebagai putri pertama Bung Karno, adalah tokoh pemberani yang paling berpengaruh melawan tindakan otoriter dari pemerintah orde baru ketika itu. Saat tokoh-tokoh nasional (termasuk yang belakangan menjadi tokoh dan pahlawan reformasi) masih membungkuk-bungkuk di hadapan Pak Harto, Megawati dengan caranya sendiri, tanpa banyak bicara, secara konsisten

:: pdti.doc

Barulah setelah Megawati mengadakan perlawanan terbuka terhadap kekuasaan orde baru yang represif, nyali tokoh-tokoh lainnya mulai terlihat bangkit.

telah berani melawan tanpa kekerasan. Dia menempuh jalan demokrasi dan hukum.

Saat tokoh yang lain masih membeo atau diam pasif tak berani, Megawati yang dikekang tampil berani menghadapi berbagai tantangan dan risiko memasuki gelanggang politik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Dia *all out* dengan keyakinan untuk menegakkan demokrasi dan reformasi di NKRI ini, tanpa kekerasan dan tanpa balas dendam.

Cobalah kita sejenak menoleh ke belakang. Siapa-siapa tokoh yang berani melawan Pak Harto sebelum Megawati memukul genderang perlawanan terbuka pada Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993? Hampir tidak ada tokoh yang berani bertindak dan bersuara melawan kehendak pemerintah ketika itu. Tanpa menyebut nama, ketika itu di manakah mereka yang belakangan menyebut diri sebagai Bapak Reformasi atau Tokoh Reformasi? (Tentang hal ini ada anekdot di kalangan petugas keamanan di Cendana, bahwa di antara mereka ada yang sampai miring sepatunya saking seringnya bolak-balik sowan ke Cendana; Ada yang minta dukungan jadi ketua ormas, dan lain-lain).

Barulah setelah Megawati mengadakan perlawanan terbuka terhadap kekuasaan yang represif, nyali tokoh-tokoh lainnya mulai terlihat bangkit. Sebagian pada mulanya ikut menambangi, mensupport dan membela perjuangan (perlawanan) Megawati. Dia telah menjadi simbol dan inspirasi perlawanan terhadap kekuasaan yang otoriter ketika itu. Bukan hanya politisi yang mulai terinspirasi dan terpicu keberaniannya ketika itu, tetapi juga para pengamat yang sebelumnya bungkam atau malah memuja-muji Pak Harto, juga para pengacara dan mahasiswa, termasuk pers.

Mereka yang satu garis perjuangan atau tidak dengan Megawati, terinspirasi untuk bangkit bersama.

:: pdfi.doc

Perebutan Kantor PDI di Jl. Diponegoro 58, yang dikenal dengan Kasus 27 Juli 1996 (Kudatuli), tak menyurutkan perlawanan Megawati Soekarnoputri.

Mereka berkumpul dan berani berorasi menumpahkan segala kemarahan terhadap penguasa yang represif di Kantor DPP PDI Jalan Diponegoro, Jakarta. Keberanian yang dibayar mahal, karena kantor itu diserang 'PDI Bentukan Penguasa Orde Baru' yang didukung aparat dan orang-orang tertentu atas kolaborasi kehendak penguasa dan 'PDI Bentukan Penguasa'. Peristiwa tahun 1996 itu, kemudian dikenal dengan sebutan Kudatuli (Kasus 27 Juli).

Peristiwa Kudatuli itu, tak menyurutkan perlawanan Megawati. Dia sangat sadar bahwa dibutuhkan seorang pemimpin sebagai simbol perlawanan untuk menegakkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Jika dia surut, gerbong perlawanan yang sudah makin membesar di belakangnya itu pun akan berhenti. Jika gerbong perlawanan itu berhenti, maka reformasi pun tidak(belum tentu) akan terjadi. Maka dia pun terus berjuang dengan caranya yang tidak banyak bicara, tapi terus melangkah maju ke medan tempur sesengit apa pun dan menghadapi risiko apa pun itu. Dia kuat bahkan sungguh kuat. Dia perempuan keibuan berjiwa emas dan berhati baja.

Dialah Ibu Reformasi Indonesia! Seorang pendiam berkepribadian emas. Dia seorang pejuang sekaligus simbol dan inspirasi reformasi. Dialah yang mengibarkan panji-panji perlawanan (reformasi). Dari rahim perjuangannyalah lahir reformasi (1998) di negeri ini. Perjuangannya menegakkan demokrasi (ketika demokrasi terpasung) telah memicu keberanian tokoh-tokoh lainnya untuk ikut dan *nebeng* dalam gerbong reformasi, yang kemudian

Saat reformasi bergulir, Amien Rais dan Sri Sultan bergabung bersama Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri yang sudah sejak lama berseberangan dengan Presiden Soeharto.

melahirkan tokoh-tokoh reformis dan pahlawan reformasi. Bahkan yang mengekor belakangan setelah dicoret namanya dari daftar calon anggota MPR 1997. Mereka pun ada membusung dada menyebut diri dan disebut Bapak Reformasi. Jika jujur, harus diakui bahwa tanpa putri pertama Bung Karno, reformasi di negeri ini belum tentu terjadi. Dialah yang berani melakukan perlawanan ketika tokoh lain masih 'tidur dan sembunyi', masih mondar-mandir membungkuk-bungkuk ke Cendana, dan bahkan masih ikut dalam kekuatan represif-otoriter penguasa Orde Baru. *(Selengkapnya, baca: Rahim Reformasi Indonesia).*

Tekanan Politik Belanjut

Namun, sangat ironis. Kendati dari rahim perjuangannyalah lahir reformasi yang memaksa mundur Presiden Soeharto (1998), tetapi pada awal reformasi, Megawati justru terus mendapat tekanan politik, bukan saja dari anasir-anasir Orde Baru yang masih bercokol dalam pusaran politik masional, melainkan juga dari tokoh-tokoh reformasi yang mengusung agenda politik sektarian.

Saat itu, politisi sektarian sangat terkejut ketika PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 1999 dengan pero-

:: pdfi.doc

Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati bersama menteri Kabinet Persatuan. Megawati legowo menerima jabatan Wapres kendati PDIP pemenang Pemilu 1999.

:: pdfi.doc

Megawati Soekarnoputri dilantik jadi Presiden RI pada Sidang Istimewa MPR 2001

lehan suara hampir 35%. (Perolehan suara terbesar sejak era reformasi dalam Pemilu yang multi partai). Maka, untuk menghambat Megawati terpilih jadi Presiden dalam Sidang Umum MPR-RI 1999, mereka menggalang poros politik aliran dengan menamakan diri poros tengah. Berkolaborasi dengan anasir-anasir Orde Baru yang masih bercokol di pentas politik, terutama dalam tubuh Partai Golkar.

Kepatutan politik terabaikan. Pimpinan pemenang pemilu legislatif dihambat memenangkan pemilihan presiden dalam SU-MPR. Situasi itu dengan jitu (piawai) dimanfaatkan oleh Gus Dur (pendiri Partai Kebangkitan Bangsa). Kendati secara pisik telah mengalami gangguan kesehatan, pencalonannya dikabulkan. Gus Dur memainkan trik dengan lebih dulu 'menduduk-kan Amien Rais menjadi Ketua MPR dan menjanjikan (iming-iming) akan mendukung Cawapres dari Golkar dan poros tengah. Poros tengah dan Golkar pun memberi dukungan dan memilih Gus Dur jadi Presiden Keempat mengalahkan Megawati. Mereka rela memilih Gus Dur, dengan alasan Asal Bukan Mega.

Namun, Gus Dur yang sesungguhnya tidak sepaham dengan politik

:: pdfi.doc

Sidang Istimewa MPR 2001 menjatuhkan Presiden KH Abdurrahman Wahid dan memilih secara aklamasi Megawati menjadi Presiden RI Kelima didamping Wapres Hamzah Haz. Megawati membentuk Kabinet Gotong-Royong.

:: pdfi.doc

Salah satu kesalahan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah percaya kepada Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, nyaris sama dengan kesalahan Presiden Soeharto yang terlalu percaya kepada BJ Habibie.

aliran dan anasir-anasir Orde Baru, melakukan manuver dalam pemilihan wakil presiden esok harinya. Dia justru membujuk Megawati untuk bersedia diusung PKB menjadi Calon Wakil Presiden. Megawati bersaing dengan Hamzah Haz yang diusung poros tengah dan Golkar. Megawati memenangkan pemilihan Wakil Presiden.

Namun, duet Gus Dur – Megawati hanya bertahan lebih satu tahun. Gus Dur terkesan menganggap remeh Megawati yang terindikasi kuat pada pemberhentian kader PDI-P Laksamana Sukardi, dari jabatan Menteri BUMN, tanpa sepengetahuan Megawati dan tanpa alasan yang jelas. Megawati pun melakukan perlawanan atas 'bujukan' politisi poros tengah dan Golkar, yang kadernya telah lebih dulu dipecat Gus Dur dari kabinet. Akhirnya, dalam Sidang Istimewa MPR, Gus Dur jatuh dan secara aklamasi digantikan Megawati. *(Selengkapnya, baca: Presiden RI Kelima, Pemimpin Berkarakter).*

Musuh dalam Selimut

Bagi Megawati mengelola negara harus dilakukan dengan semangat gotong-royong (inti Pancasila). Dia pun menghimpun semua partai politik dalam kabinetnya. Tetapi ketulusan dan kegotong-royongan politik yang dilakoni Presiden Megawati dengan mempercayai para pembantunya (Kabinet Gotong-Royong), telah dimanfaatkan sebagian pembantunya. Air susu dibalas dengan air tuba. Belakangan, Megawati merasa dikhianati dan ditikam dari belakang oleh pembantunya yang ternyata adalah musuh dalam selimut.

Salah satu ketulusan politik, ketika Megawati menjabat presiden, dia

:: pdfi.doc

PILPRES 2004: Calon Presiden Megawati Soekarnoputri bersalaman dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, dua Menko-nya (Polkam dan Kesra) yang diam-diam mempersiapkan diri menjadi pesaingnya sebagai pasangan Capres-Cawapres.

tidak membawa kader PDI-P menjadi tangan kanan di istana, baik Menteri Sekretaris Negara maupun Sekretaris Kabinet, atau jabatan penting lain di istana. Juga jabatan-jabatan strategis lain, seperti Menkopolkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala BIN. Dia percaya kepada 'orang lain' yang diharapkannya juga akan tulus menjalankan jabatan kenegaraan yang dipercayakan kepadanya. Sayang, harapan kepercayaannya beberapa meleset.

Maka, dia sangat kecewa ketika pembantunya bak musuh dalam selimut dan menusuk dari belakang. Apalagi pembantunya yang secara lihai telah jauh hari mempersiapkan diri menjadi pesaingnya dalam Pilpres pertama secara langsung (2014). Padahal lebih dari satu kali dia bertanya kepada pembantunya itu, apakah ada keinginan menjadi calon presiden, tidak pernah ada pengakuan. Di samping itu, tampaknya dia tidak menerima informasi yang cepat dan akurat dari pembantunya yang lain, terutama yang dipercayainya di lembaga intelijen. Sehingga dia kecolongan ditikam pembantunya sendiri dari belakang (pengkhianat, brutus).

Menurut pengamatan *Redaksi TokohIndonesia.com*, kesalahan politik Presiden Megawati yang terbesar adalah terlalu percaya kepada Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono. Hampir menyamai kesalahan fatal Presiden Seoharto

Pengamatan *TokohIndonesia.com*, kesalahan politik Presiden Megawati yang terbesar adalah terlalu percaya kepada Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono. Hampir menyamai kesalahan fatal Presiden Seoharto yang terlalu percaya kepada BJ Habibie.

yang terlalu percaya kepada BJ Habibie. Sehingga kedua tokoh (presiden) ini tampaknya sangat merasa sakit hati karena merasa ditikam dari belakang oleh orang kepercayaannya. Luka hati mereka tampaknya susah disembuhkan. Bahkan Pak Harto tak mau ketemu BJ Habibie sampai akhir hayatnya.

Dendam! Tampaknya bukan, atau tidak persis demikian. Karena kedua tokoh ini tampaknya tidak berhasrat untuk membalasnya. Hanya luka hati mereka yang tampaknya susah disembuhkan. Pedih! Apalagi, orang yang membuat luka hati nan pedih itu, tampaknya tidak merasa bersalah sama sekali.

Bukti bahwa Megawati bukan pendendam terlihat dari perlakuannya kepada Presiden Kedua Soeharto. Sejak Soeharto jatuh, hingga Megawati menjadi Presiden, sampai saat ini, dalam pengamatan *Tokoh-Indonesia.com*, tak sekali pun Megawati menghujat Pak Harto. Padahal pihak yang paling 'dizalimi' orde baru adalah Bung Karno dan keluarganya. Dalam pengamatan *TokohIndonesia.com*, Megawati menempatkan Pak Harto sebagai lawan (*counterpart*) politik yang memang saling berhadapan, bertanding. Bukan orang kepercayaan yang menjadi musuh dalam selimut dan menusuk dari belakang.

Kaderisasi Pemimpin

Selain ketulusan politik, saat itu PDI-P juga belum mempunyai banyak kader yang mumpuni menjabat jabatan penting. Maklum, sebuah partai tertindas selama pemerintahan orde baru, tiba-tiba menjadi pemenang Pemilu dan partai pemerintah. Kader belum siap.

Maka di tengah kegagalannya dalam dua kali Pilpres secara langsung (2004 dan 2009), Megawati konsisten di luar pemerintahan dan memberi perhatian serius dalam proses kaderisasi di tubuh PDI-P untuk siap menjadi kader berkualitas, petugas partai ideologis, dalam mengemban amanat rakyat sebagai pejabat negara. Puncak dari proses kaderisasi ini tertuang (tercermin) dalam salah satu keputusan Kongres PDI-P 2010, yang memberikan mandat kepada Megawati untuk memilih calon presiden dan wakil presiden 2014.

Keputusan kongres ini sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa Megawati sudah tidak akan maju lagi jadi Capres. Dia sudah memilih posisi dan diberi mandat oleh kongres sebagai *Queen Maker*. Dia menjadi penentu siapa capres yang akan diusung PDI-P. Syukur jika ada kader internal yang siap untuk menerima penugasan partai menjadi presiden. Jika belum, dia juga diberi mandat untuk menetapkan siapa putera bangsa yang mumpuni untuk itu. *(Selengkapnya, baca: Petugas Partai Ideologis).*

Tak diduga, proses kaderisasi internal PDI-P, berlangsung sedemikian masif dan cepat. Sehingga memunculkan beberapa nama kader, petugas partai ideologis (Pancasila) yang hebat. Satu di antaranya Jokowi, dari Solo meroket ke tingkat nasional. Jadilah Jokowi yang belum dua tahun terpilih menjabat Gubernur DKI Jakarta (2012) diberi mandat (ditugaskan) menjadi Capres dan berhasil memenangkan Pilpres 2014. (Selengkapnya, baca: Sang Negarawan, *The Great Queen Maker).*

PDI-P menjelma menjadi partai kader ideologis (Pancasila) paling

:: pdip.doc

KADERISASI: 10 tahun konsisten berara di luar pemerintahan, Megawati giat melakukan kaderisasi PDI-P untuk siap merebut kekuasaan dan menjalankan misi perjuangan dan amanah rakyat.

berhasil dalam era reformasi. Setelah terseleksi secara alamiah, saat beberapa kader yang merasa diri paling hebat tersingkir dan memisahkan diri, internalisasi kader ideologis (Pancasila) berlangsung sedemikian rupa. PDI-Perjuangan tidak mau terbawa arus pragmatisme. Selama 10 tahun memilih berada di luar pemerintahan, untuk kemudian siap merebut kekuasaan pemerintahan itu. Pemerintahan yang taat azas Pancasila.

Megawati adalah politisi ideologis (Pancasila) yang teguh. Dia adalah personifikasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebuah partai yang paling konsisten mempertahankan ideologi Pancasila. Di tengah arus reformasi yang nyaris mengganti dan melupakan ideologi dan dasar negara Pancasila, PDI-P tak pernah ragu bersikap untuk mempertahankan Pancasila. *(Selengkapnya, baca: Megawati, Politisi Pancasila).*

Saat sebagian politisi (partai politik) bersikap ambivalen terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa, PDI-P selalu konsisten untuk memperjuangkan dan mempertahankannya. Sulit dibayangkan, bagaimana posisi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, jika PDI-P tidak memenangkan Pemilu 1999.

Saat itu, sudah ada tokoh partai yang mengusulkan agar RI menjadi negara federal. Pancasila tidak lagi disebut-sebut, apalagi untuk diimplementasikan. Keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) sudah nyaris dilenyapkan dari posisi sebagai semangat pemersatu bangsa. Aparat pemerintah dan politisi tak sedikit yang bersikap ambivalen terhadap dasar dan konstitusi negara.

Syukur, mayoritas rakyat Indonesia (*mainstream*) masih teguh mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga niat beberapa politisi aliran yang ingin menggantinya tidak bisa terwujud. Ternyata, rakyat (*mainstream*) adalah benteng Pancasila yang paling tangguh. Dan, Megawati, politisi terhebat Indonesia masa kini, diyakini sangat menyadari hal itu. Merdeka!

■ **mti - TokohIndonesia.com**

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Rahim Gerakan Reformasi

Megawati Soekarnoputri adalah Ibu Gerakan Reformasi Indonesia. Dari rahim dan rentetan perjuangannyalah lahir spirit gerakan reformasi 1998. Diawali dari perjuangannya pada Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya, Desember 1993. Dia ulet, teguh dan tangguh dalam menghadapi tekanan politik penguasa orde baru yang berusaha memasung demokrasi dan menutup pintu politik bagi keluarga Bung Karno. Sesungguhnya, sejak itulah Megawati mengawali gerakan reformasi.

Ketika itu, pemerintah menghendaki Budi Hardjono menjadi Ketua Umum DPP PDI (Partai Demokrasi Indonesia) menggantikan 'si anak yang mulai nakal' Soerjadi. Untuk itu diselenggarakan Kongres IV PDI di Medan, Juni 1993, dan dibuka oleh Presiden Soeharto. Namun, kemudian kongres itu dibuat *deadlock* akibat Budi Hardjono, calon ketua umum yang didukung pemerintah, tidak terpilih. Mayoritas peserta kongres ingin tetap mempertahankan Soerjadi sebagai ketua umum. Padahal pemerintah sudah tidak menghendaki, karena Soerjadi dianggap sudah berubah dan mulai lantang serta tak mudah lagi diatur.

Kala itu, memang Soerjadi sudah berani mengajak putera-puteri Bung Karno aktif dalam PDI. Megawati menjadi Ketua DPC PDI Jakarta Pusat dan pada Pemilu 1987 terpilih pula menjadi Anggota DPR/MPR (1987-1992). Perolehan kursi PDI di DPR pun naik dari 24 kursi (Pemilu 1981) menjadi 40 kursi Pemilu 1987 dan naik lagi menjadi 56 kursi pada Pemilu 1992. Sehingga, jika langkah Soerjadi ini dibiarkan, pemerintah Orde Baru mengkuatirkan tak mustahil PDI akan bisa mengancam mayoritas tunggal Golkar.

Apalagi kala itu, Soerjadi dengan lantang menuntut, bahwa penyelenggaraan Pemilu tidak cukup hanya Luber (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) sebagaimana sudah didengungkan pemerintah, tetapi juga harus Jurdil (jujur dan adil). Sebuah tuntutan sekaligus sindiran kepada pemerintah.

Maka, dalam Kongres IV PDI di Medan Juni 1993 itu, Soerjadi yang sudah dipastikan akan terpilih kembali untuk memimpin PDI periode 1993-1998, dihambat dengan menciptakan kegaduhan sehingga kongres macet. Lalu Soerjadi digusur dengan membentuk DPP

:: pdip.or.id

Megawati Soekarnoputri, dari rahim perjuangannya lahir gerakan reformasi di Indonesia

::kompas.com

Megawati Soekarnoputri, Ibu Reformasi Indonesia

PDI Caretaker dipimpin oleh Latief Pudjosakti yang bertugas segera menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Kongres Luar Biasa pun diselenggarakan di Surabaya (2-6 Desember 1993). Pemerintah tetap menjagokan Budi Hardjono. Tapi, di tengah situasi itu, Megawati mengibarkan bendera dengan menyatakan kesediaan memimpin PDI. Pernyataan Megawati itu mendapat respon yang amat antusias dari semua cabang. Hal ini telah membuat niat pemerintah mendudukkan boneka di tampuk pimpinan PDI menjadi semakin tidak mudah. Bagi pemerintah otoriter ketika itu, pernyataan Megawati itu adalah genderang perlawanan yang mesti dihadapi dengan segala cara.

Melihat dukungan mutlak kepada Megawati itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri yang berperan sebagai pembina politik dalam negeri bersama Kasospol ABRI dan segenap jajaran Kakan Sospol daerah tingkat I dan II seluruh Indonesia melakukan gerakan antisipasi dengan 'mengawal' para peserta kongres ke Surabaya.

Tapi, dalam forum pemandangan umum kongres, hampir semua cabang tak takut menyatakan dukungan mutlak kepada Megawati. Melenceng dari 'kawalan' penguasa. Dukungan untuk Megawati Soekarnoputri sangat besar.[1] Melihat kenyataan dukungan kepada Megawati dalam pemandangan umum itu, sudah dapat dipastikan Megawati

[1] East, Roger; Thomas, Richard (2003), Profiles of People in Power: the world, Government Leaders. Routledge, hal.232-234.

akan terpilih dalam sidang pemilihan ketua umum.

Situasi dan kenyataan ini tidak dikehendaki pemerintah. Maka pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri bersama Kasospol ABRI dan ajaran Kakan Sospol daerah tingkat I dan II seluruh Indonesia berusaha melakukan manuver mengulur-ulur waktu sidang pemilihan ketua umum sampai masa izin kongres berakhir pukul 24. Dicoba menciptakan situasi agar kongres ricuh dan mengalami *deadlock*.

Suasana di arena kongres ketika itu, sangat tertekan. Aparat keamanan dengan berbagai perlengkapannya sudah lalu-lalang dan berjaga-jaga, layaknya siaga mengepung musuh negara. Malam pukul 20.00 saat peserta kongres makin tertekan dan sebagian sudah meninggalkan arena kongres, situasi yang dikehendaki penguasa, tetapi Megawati tetap bertahan di tempat siap mengikuti setiap detik perkembangan. Ketika itu tersiar isu (disiarkan isu) akan terjadi kerusuhan akibat ricuhnya kongres.

Tak lama, seorang aparat dengan naik panser menemui Megawati. Dengan bersikap siap dan sigap sebagai seorang prajurit, aparat berpakaian tempur itu menyampaikan pesan atasannya kepada Megawati agar keluar dari arena kongres dengan naik panser demi keamanan. Sejenak Megawati menatap aparat itu, lalu dengan suara tegas mempersilahkan keluar sebentar. Aparat itu menurut berdisiplin.

Setelah itu, Megawati menitikkan air mata. Dia menangisi nasib bangsanya. Dia tahu bahwa hal itu hanya taktik busuk penguasa yang tanpa sungkan mengebiri demokrasi. Lalu, setelah menghapus air mata, dia meminta si aparat suruhan itu

Taufik Kiemas setia dampingi perjuangan politik Megawati Soekarnoputri, sampai ajal menjemput.

KLB PDI 1993 DI SURABAYA: Sekitar pukul 22.00, dua jam sebelum masa izin kongres berakhir, Megawati bangkit melakukan sesuatu yang tak terduga oleh siapa pun. Dia melakukan konfrensi pers, mengeluarkan pernyataan politik yang menegaskan bahwa secara de facto kongres telah memilihnya menjadi Ketua Umum PDI periode 1993-1998.

masuk kembali. Dengan berwibawa, tak terkesan baru menitikkan air mata, dia menyatakan sikapnya dengan tegas bahwa apa pun yang terjadi tak akan meninggalkan arena kongres sampai akhir. "Laporkan kepada atasanmu," katanya tegas layaknya panglima tertinggi.

Kenapa dia menolak 'perlindungan' aparat itu? Sebab dia pemberani tanpa kekerasan. Dia siap menanggung segala risiko tanpa melawannya dengan kekerasan. Dia menyadari jika meninggalkan arena kongres maka sekali lagi lonceng kematian demokrasi akan berdentang. Bisa saja penguasa akan melakukan sesuatu untuk menyulut kemarahan massa untuk menciptakan kerusuhan yang akan dijadikan sebagai alasan pembunuhan terhadap demokrasi. Selain itu, dia sadar, jika menuruti 'perlindungan' yang ditawarkan aparat, dia akan diteriakkan meninggalkan kongres yang akan dijadikan alasan gagalnya kongres.

Sekitar pukul 22.00, dua jam sebelum masa izin kongres berakhir, Megawati bangkit melakukan sesuatu yang tak terduga oleh siapa pun, baik petinggi partai yang loyal kepadanya, maupun yang berlawanan

dengannya terutama pemerintah. Dia melakukan konfrensi pers. Saat itu, dia mengeluarkan pernyataan politik yang menegaskan bahwa secara *de facto* kongres telah memilihnya menjadi Ketua Umum PDI periode 1993-1998. Kemudian secara *de jure* akan ditetapkan dalam suatu Munas atau sejenisnya di Jakarta dalam waktu dekat. Kepada semua peserta kongres dan para simpatisan dihimbau untuk pulang ke tempat masing-masing dalam suasana damai, tertib dan tenteram.

Pemerintah dan para lawan politiknya terperangah, tak menduga pernyataan politik yang demikian penting dan brilian itu. Tidak ada lagi alasan merekayasa sesuatu untuk dijadikan kambing hitam kerusuhan akibat ricuh dan molornya jadwal kongres itu. Itulah genderang perlawanan terbuka dari Megawati. Genderang itu tidak hanya disambut oleh kader dan simpatisan PDI Mega, tetapi disambut berbagai lapisan, lintas agama, lintas golongan dan lintas partai (termasuk kader Golkar yang progresif dan ingin menegakkan demokrasi secara sungguh-sungguh).

Kemudian, Munas PDI di Jakarta tahun 1994 pun terselenggara dan mengukuhkan (*de jure*) Megawati sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998. Pemerintah yang dipimpin seorang jenderal dan ketika itu menggunakan Golkar sebagai alat politik (perpanjangan tangan militer di arena politik) dan terkenal demikian 'lihai' membentengi kekuasaannya dengan berbagai cara, tampak merasa kecolongan.

Presiden Soeharto jelas tidak menyukai Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Sama seperti Soerjadi yang sebelumnya telah digulingkan karena dianggap telah terlalu lantang berbicara. Tetapi, ironisnya, tanpa diduga, upaya menyingkirkan Soerjadi itu, ternyata telah membuka jalan bagi Megawati untuk naik ke tampuk pimpinan PDI.[2] Sementara, Budi Hardjono, yang diunggulkan pemerintah ternyata sangat kurang mendapat dukungan peserta kongres. Bahkan terlalu lemah untuk menandingi Megawati.

Sehingga, sejak itu, kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), telah mulai terlepas dari kendali

[2] Robert Hefner, Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia, Princeton University Press, 2000, hlm. 180-181.

Jalan Hidup Megawati

Megawati Soekarnoputri dilahirkan di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Fatmawati melahirkannya dalam suasana yang tidak nyaman. Ketika itu hujan turun deras, atap rumah bocor, guntur menggelegar, kilat menyambar-nyambar dan tanpa listik. Mega lahir dalam suasana cahaya temaram lampu minyak tanah.

Menurut kerabat, suasana kelahiran Megawati itu menjadi semacam pertanda untuk perjalanan hidupnya kemudian. Memang, setelah Soekarno jatuh, Mega dan keluarga mendapat cobaan dan tekanan politik yang cukup berat. Mega dan saudara-saudaranya terasing dari dunia ramai. Mereka hidup dalam kondisi yang tertekan. Sampai-sampai kuliah Megawati di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972) tak bisa diselesaikannya.

Ditambah lagi cobaan hidup pribadi yang dialaminya. Suami pertamanya, Lettu (Penerbang) Surindro Supjarso hilang dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Skyvan T-701 yang dipilotinya di Biak, Irian Jaya tahun 1970. Padahal saat itu Megawati tengah mengandung anak kedua. Sampai kini jenazah Surindro tidak pernah ditemukan. Dari pernikahannya dengan Surindro, Megawati memperoleh dua orang anak yakni Moch. Pranada Prabowo Suramagendra Karna Jaya dan Moch. Rizki Pratama.

Kemudian, tahun 1972, Mega sempat menikah dengan Hassan Gamal Ahmad Hasan, seorang diplomat Mesir yang sedang bertugas di Jakarta. Tetapi perkawinan itu, kemudian

:: mpr.go.id

pemerintah. Lalu muncul analisa kepentingan politik penguasa untuk tidak mengakui dan memaksa mundur Megawati dari kursi Ketua Umum PDI.

Sebagaimana juga dipaparkan Greg Barton, dosen senior pada Fakultas Seni Deakin University, Geelong, Victoria, Australia, selama tiga tahun sejak 1993, Soeharto mencoba melemahkan Megawati dengan menggunakan sejumlah kaum oportunis, para perwira militer pro Habibie, dan unsur-unsur ICMI untuk merekayasa pertentangan dalam PDI, sedangkan dari luar, digunakanlah fitnah dan intimidasi.[3]

[3] Greg Barton, Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, LKiS Yogyakarta, Cetakan I Juni 2003, hlm 261.

Hal ini terlihat juga dari sikap Mendagri Jenderal (Purn) Yogie S Memet selaku pembina politik dalam negeri kala itu, yang tidak bersedia melantik Megawati. Sementara, dalam internal PDI pun terjadi konflik kepentingan. Terutama dari kelompok yang loyal kepada pemerintah (mendapat pengakuan dan dukungan dari pemerintah) mendorong supaya segera diselenggarakan kongres. Mereka beralasan, sesuai klausul anggaran dasar PDI bahwa enam bulan setelah Munas (1994), kongres harus diselenggarakan.

Sementara itu, pemerintah pusat dan elit politik Golongan Karya (Golkar) waktu itu, tampak mulai gerah dan kuatir, jangan-jangan PDI di bawah Megawati akan semakin

dibatalkan karena Mega masih dianggap terikat perkawinan yang sah dengan Surindro. Sebab, ketika itu belum ada kepastian mengenai nasib suami pertamanya itu. Baru beberapa saat kemudian, ada kepastian dari Angkatan Udara bahwa Surindro telah gugur dalam musibah jatuhnya pesawat itu kendati jenazahnya tak pernah ditemukan sampai hari ini.

Tak lama setelah itu, Mega menikah dengan Taufik Kiemas[1], seorang Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) asal Sumatera Selatan. Pernikahannya dengan Taufik Kiemas membuahkan satu orang putri yakni Puan Maharani, yang tampak mengikuti jejaknya.

[1] **Taufiq Kiemas**, lahir di Jakarta, 31 Desember 1942, Ketua MPR 2009-2014; Anggota DPR periode 2004-2009 dan 2009–2014 dari PDI-P untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II; Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI-P. Kader GMNI ini seorang politisi Berbasis Kerakyatan. Bergelar Datuk Basa Batuah, keturunan Palembang-Minangkabau. Ayahnya adalah seorang guru yang pergi merantau ke Palembang. Sedangkan ibunya, Hamzathoen Roesyda, berasal dari kanagarian Sabu, Batipuah Ateh, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Pada masa kecilnya, Megawati banyak menikmati pengalaman indah. Maklum, sebagai puteri presiden, Megawati menghabiskan masa kecilnya di lingkungan Istana Merdeka. Dari kecil, dia sudah menampakkan sosok lembut dan pendiam. Namun, dia senang menari. Bahkan kerap menari di hadapan tamu-tamu ayahnya di istana. Selain itu, Adis — panggilan Megawati oleh Bung Karno — suka dengan tanaman. Dia pun berkebun anggrek di salah satu sudut istana.

Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega — panggilan akrab para pendukungnya — sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Dia bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendong-

membesar dan mendapat dukungan luas pada Pemilu 1997, sehingga dikuatirkan akan mengancam dominasi Golongan Karya (mayoritas tunggal) dan keberadaan pemerintah Orde Baru (status quo). Sebab, upaya yang dilakukan untuk menyingkirkan Megawati sejak KLB PDI di Surabaya (1993), ternyata tidak seefektif yang diharapkan. Tampak pemerintah tak menduga si putri pendiam itu akan membunyikan genderang perlawanan sedahsyat itu. Sehingga kepemimpinan Megawati terus ditekan dan dirongrong.

Apalagi saat itu, Golkar telah melakukan jajak pendapat secara rahasia untuk menjajaki sejauh mana Megawati merupakan ancaman penting dalam Pemilu 1997. Seperti diungkapkan Robert Hefner[4], para ahli strategi Golkar dan ICMI terkejut ketika jajak pendapat itu menunjukkan bahwa PDI pimpinan Megawati jauh lebih populer daripada Golkar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, pada awal tahun 1990-an, telah ada perkiraan dan analisa intelijen yang disampaikan oleh Jenderal TNI LB Moerdani (pangli-

[4] Robert Hefner, Civil Islam, op.cit, hlm. 182.

krak suara. Mega berkenan dan tampak enjoy.

Karena, mungkin, dia telah lama menunggu terbukanya kesempatan itu. Kendati saat itu dia nekad mengingkari 'kesepakatan' keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Mega tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara dibanding para pembicara lain. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Kemudian Mega pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun 1993 dia terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.

Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Dia lebih banyak diam. Kinerjanya sebagai anggota dewan dinilai kurang. Posisi primadona masa kampanye, tidak tercermin pada dirinya saat duduk di legislatif itu. Bahkan dia sering tak datang ke DPR. Di samping karena dia memang pendiam, Pemerintah Orde Baru pun menghendakinya untuk tidak banyak berkiprah di hadapan publik.

Tampaknya, Megawati tahu bahwa dia masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, dia pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka dia memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang *silent operation*, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya Bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.

■ TokohIndonesia.com

:: kebudayaanindonesia.net

Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri bersama pendukungnya

ma ABRI, 1988-1993) dan Marsekal Muda TNI Teddy Rusdy (Asisten Perencanaan Umum Mabes ABRI) yang mengestimasi bahwa: *Pertama*, puncak dari kepemimpinan Presiden RI Soeharto adalah tahun 1994; *Kedua*, menjamurnya dan mengguritanya konglomerasi memicu antipati rakyat Indonesia; *Ketiga*, Megawati Soekarnoputri akan menjadi simbol '*the oppressed people*' dan menjadi erosi bagi kekuasaan Presiden RI Soeharto; *Keempat*, dengan semakin kuatnya ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), maka akan terjadi erosi dukungan kepada Golkar, karena faksi-faksi akan beralih ke kanan. Maka sehubungan dengan estimasi intelijen itu direkomendasikan kiranya Presiden RI Soeharto berkenan mundur sebagai orang terhormat.[5]

Jajak pendapat dan analisis intelijen serta membuncahnya kekuatiran akan semakin tingginya popularitas Megawati, mendorong pemerintah semakin mengintensifkan kampanye penekanan kepada Megawati.[6] Sejak saat itu, kampanye itu ditangani langsung oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung[7] dan Kasospol ABRI Letjen Syarwan Hamid, dan bukan oleh orang-orang ICMI, seperti Din Syamsuddin dan Amir Santoso serta kolega mereka dalam biro penelitian dan pengembangan Golkar.[8]

Dalam kondisi itu, pemerintah pusat mendorong dan mendukung orang-orang di tubuh PDI yang dinilai masih loyal pada pemerintah

[5] Servas Pandur, Think Ahead: 70 Tahun Teddy Rusdy (Biografi), Herakles Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 548.

[6] Greg Barton, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, op.cit, hlm 263.

[7] Panglima ABRI yang merajut hubungan erat dengan ICMI, berbeda dari sebelumnya ketika Jenderal Benny Moerdani dan Jenderal Try Sutrisno menjabat Panglima ABRI.

[8] Greg Barton, Op.Cit, hlm 266.

untuk segera menyelenggarakan kongres menjatuhkan Megawati. "Jadi, ada soal internal yang berpadu dengan soal eksternal, untuk menyingkirkan Mega," kata Alex Widya Siregar, Wakil Bendahara PDI Soerjadi.[9] Salah satu di antaranya adalah Ketua DPP PDI Fatimah Achmad.

Pada 3 Juni 1996, dalam sebuah rapat DPP PDI di kantor PDI Jalan Diponegoro, Jakarta, Fatimah Achmad bersama Ismunandar mengintensifkan dan memanfaatkan keinginan pemerintah untuk menggusur Megawati. Mereka mendesak agar rapat membahas usulan cabang-cabang yang menginginkan segera dilakukan kongres memilih ketua umum. Fatimah mengklaim, sebanyak 215 dari 306 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) sudah menyetujui perlu segera diselenggarakannya kongres luar biasa.

Jika memang pengurus cabang benar sudah mengusulkan, Megawati tidak keberatan dengan usul itu. Megawati pun menunjuk Soetardjo Soerjogoeritno sebagai ketua panitia kongres. Tetapi Fatimah dan kawan-kawan tidak setuju Soetardjo yang menjadi ketua panitia. Rapat itu pun berakhir tanpa keputusan.[10] Lalu, disepakati akan dilanjutkan esoknya.

Esoknya 4 Juni 1996, rapat dilanjutkan, tetapi hanya dihadiri 11 dari 27 orang pengurus. Sebanyak 16 orang lainnya tidak hadir. Kendati demikian, pada rapat itu, diputuskan usul penyelenggaraan kongres ditolak. Sebab, ternyata setelah diverifikasi, surat cabang-cabang yang meminta kongres itu tidak sah.

Sementara, pada saat bersamaan di tempat lain, tepatnya di Hotel Wisata Internasional, ke-16 pengurus yang tidak hadir pada rapat di Jalan Diponegoro, yang selanjutnya menamakan diri Kelompok 16, sedang menggelar rapat juga. Besoknya, 5 Juni 1996, Kelompok 16 memutuskan penyelenggaraan kongres dan langsung mengumumkan terbentuknya panitia yang diketuai Fatimah Achmad, didampingi sekretaris, Ismunandar.

Pemerintah dengan kepentingan politiknya pun menyatakan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kongres Luar Biasa PDI di Medan. Panglima ABRI Feisal Tanjung dan Kasospol ABRI Syarwan Hamid menyatakan akan mendukung dan mengamankan pelaksanaan kongres.[11] Bahkan para pejabat daerah seluruh Indonesia pun, baik pejabat sipil maupun militer, memfasilitasi cabang-cabang PDI supaya mendukung kongres tersebut. Sehingga Megawati sudah harus jatuh sebelum Pemilu 1997 berlangsung.

Sementara DPP PDI (Megawati) yang dengan tegas menolak kongres menyatakan akan melayangkan surat kepada Menkopolkam Soesilo Soedarman, Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, Mendagri Yogie SM dan Menhankam Edi Sudradjat, untuk meminta waktu audiensi guna menjelaskan mengapa mereka menolak kongres. Serta melaporkan adanya tekanan oknum-oknum yang mendesak cabang-cabang untuk mendukung kongres PDI itu.[12] Sekjen DPP PDI

[9] Wawancara Alex Widya Siregar: "Saya Bertanggung jawab Atas Penyerbuan", TEMPO, 01 Agustus 1999
[10] Ketika Penguasa Harus Memilih, Tempo 13-04-2000 http://www.tempo.co.id/harian/fokus/7/2,1,3,id.html
[11] Ibid.
[12] HM. Soeharto Dalam Berita, Jilid XVIII (1996), Antara Pustaka Utama, 2008, hlm.73.

:: pdiri-ap

Massa pendukung PDI Megawati Soekarnoputri melakukan long-mars

Alexander Litaay mengatakan, sebelumnya pihaknya juga telah melayangkan surat resmi ke Mabes Polri meminta agar Polri tidak memberikan izin kongres kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan PDI.

Namun, izin tetap diberikan dan kongres pun terlaksana di Medan, 20-24 Juni 1996. Kongres itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi, seperti Mendagri Jenderal (Purn) Yogie S Memet, Pangab Jenderal Feisal Tanjung, dan Kasospol ABRI Letjen Syarwan Hamid.

Mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen (Purn) Syarwan Hamid mengakui, dirinya ikut berperan dalam penyelenggaraan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan. Kongres itu diselenggarakan setelah menerima masukan dari Menteri Dalam Negeri Yogie SM. Menurut dia, Yogie SM ketika itu, menyimpulkan penyelesaian kemelut PDI yang berkepanjangan antara kubu Soerjadi dengan kubu Megawati Soekarnoputri itu hanya bisa diselesaikan melalui kongres.[13]

Sementara, Megawati cs yang tidak menyetujui penyelenggaraan kongres itu, tidak mau hadir dan memprotes kongres bersama para pendukungnya. Pada 19 Juni 1996, sehari sebelum pembukaan Kongres di Medan itu, Megawati memecat Kelompok 16. Hari itu juga, ribuan warga PDI pro-Mega melakukan *long march* dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Kemudian, bersamaan dengan pembukaan kongres di Medan, 20

[13] Letjen (Purn) Syarwan Hamid mengungkapkan hal itu kepada wartawan, Jumat (5/5/2000), di Direktorat Reserse, Mabes Polri, Jakarta, begitu selesai diperiksa sebagai saksi kasus penyerangan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta. (Kompas, Sabtu, 6 Mei 2000).

Juni 1996, Mega juga melepas *long march* pendukungnya dari kantor DPP PDI Jalan Diponegoro menuju Monas dipimpin Sophan Sophian. Namun di depan stasiun Gambir, aparat mengamankan dan melarang melanjutkan *long march* itu ke depan istana. Sempat terjadi bentrok yang mengakibatkan luka-luka dari dua belah pihak, baik pihak peserta *long march* maupun pihak aparat keamanan.

Besoknya, 21 Juni 1996, Megawati menyatakan dirinya tetap sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998. Namun, Kongres di Medan terus berlangsung. Pada 22 Juni 1996, Kongres PDI di Medan itu memilih kembali Drs. Soerjadi secara aklamasi sebagai ketua umum dan sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal. Padahal, semula, pada Kongres IV di Medan (Juni 1993), Soerjadi sudah 'disingkirkan' pemerintah karena dinilai sudah mulai 'unjuk diri', namun untuk mengimbangi kekuatan Megawati, dia ditarik (dipercaya) kembali oleh pemerintah. Dan, anehnya, Soerjadi pun menurut pula. Ketidak konsistenan inilah yang meruntuhkan pamor politik Soerjadi, yang pada awalnya dialah yang mengajak Megawati berjuang dalam politik.

Sejak itu, terjadi kisruh atas dualisme kepemimpinan PDI. Yakni, PDI di bawah kepemimpinan Megawati yang secara de facto mendapat dukungan dalam Kongres di Surabaya (Desember 1993) dan dikukuhkan dalam Munas di Jakarta (1994), dan PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi hasil Kongres Medan (Juni 1996) yang secara de jure diakui dan didukung pemerintah.

Adanya kepengurusan ganda PDI itu tentu saja berdampak pada situasi dan kondisi politik Tanah Air, terutama di Ibukota Jakarta. Apalagi PDI Soerjadi (Kongres LB Medan) bersikukuh harus berkantor di Jalan Diponegoro, karena merasa paling berhak sebagai satu-satunya pengurus PDI yang diakui pemerintah. Sementara, PDI Megawati yang sudah menguasai kantor itu, bersikukuh pula untuk mempertahankannya, karena merasa sebagai pengurus PDI de facto yang mendapat dukungan arus bawah.

Megawati dan pendukungnya tetap bersikukuh menolak keabsahan kongres Medan dan hasil-hasilnya. Mereka melakukan perlawanan, antara lain, dengan mempertahankan kantor PDI di Jalan Diponegoro, serta melakukan *long march*, unjuk rasa. Suatu kegiatan yang tidak diizinkan berlangsung ketika itu.

Mimbar Bebas Demokrasi

Dalam situasi itu, semakin banyak pula simpatisan dan anggota PDI datang dari berbagai daerah Indonesia ke Jakarta. Sebagian mereka sengaja berkumpul di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, untuk kemudian bermaksud menggelar pawai keliling kota Jakarta.

Ketika itu, enam orang pengurus DPP PDI, di antaranya, Sophan Sopian, Sutardjo Soerjogoeritno, Roy BB Janis dan Agung Sumanto, menemui Panglima Kodam Jaya Mayjen Sutiyoso, didampingi Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka meminta izin *long march* mengelilingi kota Jakarta. Namun, Sutiyoso tidak memberi izin. Dia memberi alasan dan pertimbangan bahwa dalam pawai

:: pdti.doc

Megawati Soekarnoputri berorasi di Mimbar Bebas di depan kantor PDI Jalan Diponegoro, tahun 1996. Mimbar bebas itu dipaksa diakhiri dengan menyerbu dan merebut kantor tersebut oleh PDI Soerjadi bersama aparat polisi dan tentara.

keliling sebelumnya, 20 Juni 1996, dari Jalan Diponegoro menuju Monas, telah terjadi bentrok secara fisik antara peserta *long march* dengan aparat keamanan di Gambir, Jakarta. Aksi pawai keliling itu juga dipimpin oleh Sophan Sopian Cs dan telah berakibat terjadi korban luka-luka di kedua belah pihak.

Jika *long march* dilakukan lagi, dikuatirkan akan terjadi bentrok lagi dengan aparat keamanan. Namun, Pangdam Jaya Sutiyoso memberi toleransi dengan mengizinkan para simpatisan dan pendukung Megawati berorasi di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, dengan syarat jangan sampai keluar dari pagar apalagi sampai mengganggu keamanan dan ketertiban di sekitar Jalan Diponegoro itu. Maka, sejak itu berlangsunglah mimbar demokrasi yang populer kemudian dikenal dengan mimbar bebas di Jl. Diponegoro 58 tersebut. Mimbar bebas tersebut telah menjadi embrio dari lahirnya kebebasan berbicara dan bertumbuhnya demokrasi di Indonesia.

Orasi politik bernada perlawanan politik kepada rezim Orde Baru, silih berganti, saban hari, dilakukan di tempat itu. Sebuah mimbar demokrasi, yang bisa disebut sebagai 'Deklarasi Gerakan Reformasi.' Posisi Megawati pun semakin kuat sebagai simbol perlawanan kepada pemerintah Orde Baru (*status quo*). Sekaligus, hal ini sebagai awal dari perjuangan demokrasi, embrio dari kebebasan berbicara serta tumbuh pesatnya demokrasi di Indonesia.

Mimbar bebas di kantor PDI tersebut telah membuka katub kebebasan berbicara dan demokrasi di Indonesia yang sebelumnya terbelenggu selama pemerintahan Orde Baru. Kebebasan mimbar tersebut terus menggelinding bagai gulungan salju yang semakin besar.

Mimbar bebas itu pun mengakomodasi dukungan kepada Megawati yang datang dari berbagai penjuru.

Megawati telah menjadi 'Ratu' yang menjadi simbol perjuangan kebebasan mimbar tersebut. Bukan hanya dari anggota dan simpatisan PDI Mega tetapi juga dari berbagai kalangan yang sudah jenuh dengan pemerintahan Orde Baru. Mereka bersatu, tumpah-ruah menyuarakan kebebasan dan mengoreksi Orde Baru.

Bukan hanya dukungan moral tetapi dukungan materil. Sebagai salah satu gambaran betapa kuatnya dukungan, di area mimbar bebas (demokrasi) itu dibuka kotak sumbangan. Tinggi kotak itu setinggi pinggang orang dewasa. Setiap hari selalu banyak orang yang memasukkan uang jumlahnya jutaan rupiah. Di samping itu, ada juga yang menyumbang dalam bentuk natura, berupa bahan makanan dan lain-lain.

Bukan hanya simpatisan dan anggota PDI yang berorasi dan berduyun-duyun datang dan memberi dukungan ke tempat itu. Partai Rakyat Demokratik (PRD), misalnya, yang didirikan para aktivis pemuda serta organisasi buruh dan berbagai organisasi, lembaga dan perorangan yang berseberangan dengan pemerintah juga memberi dukungan sekaligus memanfaatkan mimbar demokrasi itu.

Terjadi hiruk-pikuk di sekitar kantor PDI di Jalan Diponegoro tersebut. Kerumunan massa yang tidak hanya memenuhi halaman kantor tetapi juga memenuhi badan jalan, diwarnai hingar-bingar orasi dan teriakan-teriakan dari halaman kantor. Tempat itu juga sudah dipenuhi para pedagang bakso dan berbagai jenis dagangan lainnya.

Bahkan beberapa politisi pun telah ikut memanfaatkan mimbar demokrasi itu. Di antaranya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) turut pula mendukung bahkan telah dijadwalkan untuk berorasi di tempat itu. Adanya penjadwalan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan berorasi di tempat itu, telah makin memicu kekuatiran bagi pusat kekuasaan, yang semakin mendorong perlu segera dilakukan pengambilalihan kantor PDI itu.[14]

Greg Barton dalam Biografi Gus Dur menulis, Soeharto sangat terganggu oleh persekutuan antara Gus Dur dan Megawati, khususnya karena keduanya sangat disenangi kaum muda Indonesia. Soeharto sadar bahwa dalam Pemilu yang akan diadakan tahun berikutnya (1997), akan ada 20 juta orang yang akan ikut serta memilih untuk pertama kalinya.[15] Itu berarti membiarkan Megawati dan Gus Dur berkolaborasi akan sangat mengancam mayoritas tunggal Golkar dan eksistensi kekuasaan Orde Baru.

Pemerintah pusat menilai mimbar demokrasi di Jalan Diponegoro No. 58, itu telah amat berlebihan. Sebab, selain semakin memperkuat posisi Megawati sebagai simbol perlawanan kepada pemerintah Orde Baru, di tempat itu juga sudah semakin berani dan lantang mengkritik pedas dan mencaci-maki pemerintah Orde Baru. Bahkan Presiden Soeharto, yang amat berkuasa kala itu, sudah diteriakkan sebagai penguasa otoriter dan dituntut supaya mundur dari jabatan presiden. Sebuah panggung politik yang sangat tidak diizinkan (tabu) terjadi kala itu. "Pada zaman Orde Baru itu, panggung orasi politik masih ditabukan. Apa-

[14] Wawancara Drs. Lukman Mokoginta, MSi
[15] Greg Barton, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, op.cit, hlm 263.

:: pdfi.doc-sdv

Penyerbuan kantor PDI Jalan Diponegoro, tahun 1996 menimbulkan kerusuhan di sekitar Jalan Diponegoro dan Jalan Matraman, Jakarta Timur.

lagi meminta Presiden Soeharto mundur, tidak banyak orang yang berani," ungkap Sutiyoso.[16]

Kudatuli, Sulut Api Reformasi

Pemerintah orde baru menilai mimbar demokrasi di Jalan Diponegoro itu telah sangat mengganggu ketertiban umum. Presiden Soeharto sendiri menunjukkan reaksi keras atas panggung orasi politik itu. Hal itu antara lain ditunjukkan Presiden Soeharto ketika 25 Juli 1996, menerima Ketua Umum PDI Kongres LB Medan Soerjadi dan 10 pengurus lainnya yang melaporkan hasil Kongres LB PDI di Medan. Ketika itu, Presiden Soeharto meminta Soerjadi memerhatikan panggung 'setan gundul' di kantor PDI itu, sebab di sana ada 'setan gundul' penjelmaan PKI yang mendompleng.[17]

Soerjadi yang baru diterima kembali oleh Presiden Soeharto, sebagai bentuk dukungan atas kepemimpinannya kembali di PDI, tentu saja merasa bangga dan merasa dapat angin untuk merebut kantor PDI di Jalan Diponegoro itu. Sebab, sebelumnya mereka juga sudah berniat mengambil-alih kantor itu.

Kemudian DPP PDI Soerjadi atas dukungan pemerintah berupaya merebut kantor tersebut. Lalu, terjadilah Kasus 27 Juli 1996 yang

[16] Drs. Ch. Robin Simanullang, Biografi Militer Sutiyoso, The Field General, Pustaka Tokoh Indonesia,2013, hl.247.

[17] Drs.Lukman Mokoginta, MSi, mantan Ketua DPD PDI DKI Jakarta, Wawancara 6 Juli 2011

Reformasi: Mahasiswa dudukiGedung MPR

kemudian dikenal dengan sebutan Kudatuli yang memakan banyak korban. Aksi penyerangan itu berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta. Beberapa Aktivis pemuda dan mahasiswa ditangkap dan dipenjara.

Peristiwa Kudatuli itu dikira penguasa akan memadamkan keberanian perlawanan Megawati. Ternyata, tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, mengundang empati dan simpati dari masyarakat luas. Sosok Mega, yang sebelumnya dianggap biasa saja, malah muncul menjadi simbol dan pemegang kendali perlawanan kepada rezim Orde Baru yang sudah 32 tahun berkuasa. Mega, secara sadar atau tidak, akhirnya dibesarkan dan dimatangkan oleh tekanan berlebihan dan telanjang dari penguasa Orde Baru. Tanpa tekanan berlebihan penguasa, kekuatan Mega belum tentu terbentuk sedemikian rupa.

Tekanan berlebihan kepada Mega, ternyata malah menyalakan keberanian sebagian besar rakyat, tokoh dan mahasiswa untuk mengadakan perlawanan bersama. Keberanian Megawati telah memicu nyali mereka. Kudatuli, bahkan menyulut api gerakan reformasi!

Bangkitlah mahasiswa berdemonstrasi. Hampir seluruh kampus di Indonesia melakukan demonstrasi. Sampai Pemilu 1997, mahasiswa terus demo di dalam kampus. Karena ketika itu, mahasiswa dilarang demonstrasi di luar kampus.

Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997.

Namun, kondisi ini makin memancarkan kekuatan Mega. Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat, pada pemilu 1997 itu. Sebab, terbukti perolehan suara PDI pimpinan Soerjadi merosot tajam. Banyak massa pendukung PDI memilih golput, seperti halnya Mega sendiri. Sebagian lagi berpaling ke Ketua Umum DPP PPP (1989-1994) Partai Persatuan Pembangunan, yang melahirkan istilah "Mega Bintang".

Setelah Pemilu 1997, makin banyak pula tokoh yang berani tampil menyuarakan reformasi. Sebagian mereka kemudian digelari sebagai pahlawan reformasi yang bersama mahasiswa memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatan, Mei 1998.

Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan

:: pdiri.doc

Presiden Megawati Soekarnoputri dalam sebuah acara kemiliteran

bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih hampir tiga puluh lima persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Massa pendukung Mega mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden, akan terjadi revolusi.

Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah. Massa pendukung Mega lantas mengamuk di sejumlah kota seperti Bali, Solo, Medan dan Jakarta. Namun, setelah Mega terpilih sebagai Wapres, amukan massa PDIP itu pun reda. Mereka ditenangkan oleh Mega sendiri. Mega dalam pidato pelantikannya sebagai Wapres menyampaikan pesan: *"Kepada anak-anakku di seluruh tanah air, saya minta untuk bekerjalah kembali dengan tulus, janganlah melakukan hal-hal yang bersifat emosional, karena di dalam mimbar ini kamu melihat ibumu berdiri."* Banyak ibu-ibu yang meneteskan air mata mendengar pesan Mbak Mega tersebut. Massa pendukung Mega pun lega dan harus puas menerima kenyataan, Mega di posisi kedua.

Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi pertama di negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat secara aklamasi menempatkannya duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Kenyataan ini, membuktikan bahwa diam Megawati itu emas.

■ ch. robin simanullang
TokohIndonesia.com

::pdfi.doc

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

❒ Megawati Soekarnoputri

Presiden RI Kelima, Pemimpin Berkarakter

Saat menjabat Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri menunjukkan kepemimpinannya yang berkarakter. Seorang pemimpin berkepribadian kuat. Tak mudah dipengaruhi oleh siapa pun jika tidak sesuai dengan nurani dan visinya tentang cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Baginya visi dan misi para pemimpin bangsa ini tak bisa lain dari visi dan misi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Setelah MPR secara aklamasi memilih Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI Ke-5 terwujudlah kepatutan politik yang menempatkan pimpinan partai pemenang Pemilu menjadi Presiden. Terwujud pulalah amanat Kongres PDIP di Bali yang menghendaki Megawati menjadi Presiden. Kekalahan Megawati atas KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Sidang Umum 1999, yakni 313 banding 373, terbalas dengan kemenangan aklamasi pada SI-MPR 2001.

Tampaknya PDI-P tak mau terkecoh untuk kedua kali oleh kepiawian politik Gus Dur. Megawati pun tentu juga belajar juga dari kesalahan Gus Dur. Sehingga PDI-P mendukung Hamzah Haz (Ketua Umum PPP)[1] sebagai Wakil Presiden. Padahal Hamzah Haz adalah pemimpin salah satu partai yang tidak menghendaki Megawati jadi presiden dan menjadi pesaing Megawati pada pemilihan Wakil Presiden pada SU-MPR 1999, yang dimenangkan Megawati dengan suara 396 banding 284.

Pada mulanya, dalam posisi Wapres, Megawati tampak tulus mendampingi Gus Dur. Hubungan Megawati sebagai Wapres dengan Gus

:: pdfi.doc

[1] Hamzah Haz, Dr (HC) H, lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940. Wakil Presiden RI (26 Juli 2001-2004); Menko Kesra dan Taskin (1999); Wakil Ketua DPR (1999-2001); Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM (1998-1999); Anggota DPR RI (1971-2001). Alumni Akademi Koperasi Negara, Yogyakarta (1962) Jurusan Ekonomi Perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak (tingkat V, 1970), ini seorang 'Tokoh Politik yang Akomodatif'. Mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan ini juga mantan Guru SM Ketapang (1960-1962), wartawan suratkabar Bebas, Pontianak, Kalimantan Barat (1960-1961), Pimpinan Umum Harian Berita Pawau, Kalimantan Barat dan Ketua PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, (1962)

:: beritasatu.com

Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri 'sahabat bersaudara' bersama Taufik Kiemas

Dur sebagai Presiden mesra-mesra saja. Tetapi akibat kesalahan Gus Dur, yang terkesan meremehkan Megawati, hubungan itu memburuk. Makan pagi yang biasanya dilakukan tiap Rabu di kediaman resmi Megawati, tidak lagi diadakan.

Diamnya Megawati, tidak hanya mengecoh pemerintah Orba, bahkan telah membuat Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid)[2], yang terkenal piawai berpolitik, menjadi sesumbar. Gus Dur yang berhasil 'menangkap' peluang menjadi Presiden RI pada Sidang Umum MPR 1999, yang sepatutnya peluang itu adalah milik Megawati, terkesan terlalu meremehkan Megawati.

Megawati yang sudah 'mengalah' berkenan menjadi Wakil Presiden — kendati partainya PDI-P memperoleh suara terbanyak (35%) dibanding PKB hanya 10% pada Pemilu 1999 — tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik strategis pada pemerintahan Presiden Gus Dur. Di antaranya, pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Kesan kuat yang mengindikasikan bahwa Gus Dur menganggap remeh Megawati berpuncak pada pemberhentian kader PDI-P Laksamana Sukardi[3], dari jabatan Menteri

[2] Abdurrahman Wahid, KH panggilan Gus Dur, Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999-24 Juli 2001). Mantan Ketua Umum PB Nahdatul Ulama (1984-1999), lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, 4 Agustus 1940 dan wafat di Jakarta, 30 Desember 2009. (www.tokohindonesia.com/abdurrahman-wahid/)

[3] Laksamana Sukardi, Menteri Negara BUMN (1999-2004), mulai terlihat menjauh dari Megawati Soekarnoputri hanya beberapa saat setelah Megawati tidak lagi menjabat Presiden. Bahkan pada kongres PDI-P tahun 2005, dia bersama beberapa orang kader PDI-P mengambil sikap menentang kepemimpinan Megawati di PDI-P. Isu yang mereka munculkan adalah menyangkut perbedaan tajam dalam penentuan metode demokratis yang berlaku di partai. Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis beserta kelompoknya, berpandangan bahwa walaupun PDI-P adalah partai politik yang modern namun masih menggunakan metode lama otoriter, seperti memberikan hak istimewa mutlak kepada ketua partai dan hanya memiliki satu kandidat untuk posisi ketua umum. Kelompok ini pun tersingkir dan kemudian mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang mengambil sistem kepemimpinan kolektif dengan 35 orang dalam pimpinan kolektif

BUMN. Laksamana diberhentikan bersama Jusuf Kalla[4], kader Partai Golkar, tanpa sepengetahuan Megawati dan tanpa alasan yang jelas.

Sejak saat itu, si pendiam Megawati secara nyata mengambil jarak 'sahabat-saudara' dan jarak politik dengan Gus Dur. Bahkan, Megawati pelan-pelan menunjukkan ketidaksepahamannya dengan Gus Dur, baik lewat pernyataannya maupun lewat orang-orang di sekitarnya. Mega jarang hadir pada rapat kabinet yang dipimpin Gus Dur, termasuk pelantikan pejabat baru di kabinet.

Mega juga tidak hadir pada pertemuan parpol yang digagas Gus Dur di Istana Bogor. Bahkan, Megawati melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol di rumah pribadinya di Kebagusan, Jakarta Selatan, satu bulan menjelang SI-MPR 2001.

Eskalasi politik pun bergeser cepat

---

nasional. Partai ini ikut menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu 2009, bernomor urut 16. Namun, partai ini tidak mendapat dukungan berarti dari rakyat, sehingga tidak mempunyai wakil di DPR. Lalu, pada Pemilu Presiden, partai ini mendukung SBY-Boediono. Ironisnya, akibat masalah kepemimpinan PDP terpecah menjadi dua kubu yang keduanya mengaku sebagai pimpinan partai yang sah.

[1] Jusuf Kalla, Drs. H. M, lahir di Watampone, 15 Mei 1942. Wakil Presiden RI (2004-2009 dan 2014-2019)); Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial Kabinet Gotong Royong (2001-2004); Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Persatuan Nasional (1999-2000). Lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makasar, 1967 dan The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977), ini seorang pengusaha dan politisi. Dia Direktur Utama NV. Hadji Kalla sejak 1968. Menjadi Anggota MPR-RI (1988 - 2001) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar (2004-2009). Kemudian setelah tidak menjabat Wakil Presiden, dia memimpin Palang Merah Indonesia (PMI).

Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri bersama Pemimpin PLO Yasser Arafat saat berkunjung ke Indonesia.

:: beritasatu.com

Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Wakil Presiden Hamzah Haz

180 derajat. Partai-partai berbasis Islam (PPP, PAN, PBB, PK dll), yang pada Sidang Umum MPR 1999 'sangat anti' Megawati, memanfaatkan jarak renggang Mega-Gus Dur, dengan membentuk 'aliansi' atau kesepahaman politik baru dengan PDI-P.

Sebab, partai-partai berbasis Islam itu sudah lebih dulu merasa 'disepelekan' Gus Dur. Hamzah Haz, Ketua Umum PPP, sudah lebih dulu didepak dari kabinet. Kemudian menyusul Bambang Sudibyo (PAN) dan Yusril Ihza Mahendra (PBB) dan Nurmahmudi Ismail (PK), masing-masing dipecat dari jabatan Menkeu, Menkeh dan Menhutbun. Disusul lagi Bomer Pasaribu dan Mahadi Sinambela dari Partai Golkar diberhentikan dari jabatan Menaker dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Maka ketika menggelinding kasus Bulogate, yang melibatkan Gus Dur dan lingkarannya, PDI-P menjadi berseberangan dengan Gus Dur dan PKB-nya. Terbentuklah Pansus Bulogate DPR-RI, yang berujung pada jatuhnya Gus Dur pada Sidang Istimewa MPR, 23 Juli 2001. SI-MPR itu dipercepat sebagai perlawanan atas Dekrit Presiden Gus Dur yang nekad membubarkan DPR/MPR. SI-MPR itu secara aklamasi menobatkan Megawati menjabat Presiden Republik Indonesia periode 2001-2004.

Pemulihan Ekonomi

Megawati mengemban tugas yang amat berat untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang porak-poranda akibat krisis multidimensional 1998. Tim ekonominya yang saat itu digelari The Dream Team berupaya keras menciptakan kondisi yang kondusif untuk membangun kembali ekonomi yang porak-poranda tersebut.

Dengan berbagai tantangan, pemerintahannya berhasil menstabilkan fundamental ekonomi makro, meliputi inflasi, BI rate, Kurs Rupiah, angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Nilai Kurs Rupiah yang relatif stabil dikisaran Rp. 8500,-/USD. Berhasil menghasilkan devisa negara hanya dalam dua tahun mengimbangi perolehan devisa 25 tahun dalam pemerintahan sebelumnya. Harga bahan-bahan pokok pokok pun mulai stabil.

Perbankan nasional mulai disehatkan yang ditandai dengan dibubarkannya BPPN pada Februari 2004. Indonesia pun dibawanya keluar dari IMF pada tahun 2003, menandakan Indonesia lebih mandiri. Mulai punya keberanian menghentikan hutang baru. Kemauannya juga terlihat sangat kuat untuk menyelesaikan masalah BLBI, dengan keberanian menerbitkan Keppres R & D sehingga masalah berat ini tidak perlu diwariskan ke pemerintahan selanjutnya. Dia juga berani menerbitkan Keppres No 34/2004 tentang penertiban bisnis TNI.

Pemerintahannya pun secara berangsur berhasil menyehatkan BUMN. Sehingga tidak terjadi ledakan privatisasi BUMN yang terpaksa dilakukan untuk menghentikan pendarahan perusahaan BUMN dan kebangkrutan ekonomi. Pada era pemerintahannya berhasil menarik pajak yang jumlahnya sama dengan pajak sembilan tahun sebelumnya.

Presiden Megawati Soekarnoputri pidato di MPR dan memimpin Sidang Kabinet

Bahkan dalam kesulitan ekonomi saat itu, pemerintahannya telah memulai dan melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Diantaranya Tol Cipularang (Cikampek-Bandung) dalam rangka peringatan KAA, Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Tol Cikunir, Rel ganda kereta api.

Simbol Kesetaraan Jender

Megawati Soekarnoputri adalah sebuah bukti sejarah di mana perempuan layak dan mampu memimpin sebuah negeri. Kendati putri Bung Karno ini harus menghadapi rintangan isu jender ketika mencalonkan diri menjadi Presiden RI, dia bisa melampauinya.

Di tengah kenyataan bahwa perempuan masih mengalami diskriminasi dalam berpolitik di Indonesia, dengan keuletannya, Megawati telah mampu mencapai puncak menjadi orang nomor satu (RI-1) di negeri ini. Ketika Amerika Serikat belum pernah dipimpin seorang perempuan, Indonesia sudah punya Presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri. Padahal secara umum diskriminasi gender masih lebih dominan di negeri ini ketimbang di negeri paman sam. Tapi Megawati bisa!

Megawati sangat menyadari posisi sulitnya perempuan menjadi pemimpin (politik) di negeri ini. Hal ini terlihat ketika Ketua Umum PDI Perjuangan itu menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pemilu 1999. Ketika itu, banyak isu gender yang menerpa dirinya ketika mencalonkan diri menjadi Presiden RI. "Namanya politik. Pada waktu itu ada yang tidak senang dengan saya dan alasannya sangat tidak baik karena saya perempuan," ujar Megawati ketika memberikan sambutan pada peresmian kegiatan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah yang diusung PDI-P dalam Pilkada Serentak 2017 di Wisma Kinasih, Depok, Selasa (30/8/2016).

Megawati mengatakan perempuan hingga saat ini pun masih mendapatkan diskriminasi

:: mpr.go.id

Keinginannya untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan mendirikan KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi) didirikan pada tahun 2003 dan Undang-Undang KPK tahun 2002.

Berani menjaga kemandirian Indonesia dari kooptasi AS dengan keberanian membeli pesawat tempur Sukhoi & heli Mi-35 dari Rusia tanpa memberatkan APBN. Membuktikan politik luar negeri yang lebih bebas dan aktif, diantaranya dengan mengutuk agresi militer AS di Afganistan dan menolak permintaan AS untuk menyerahkan tahanan dari Indonesia.

Pertanggungjawaban Sejarah

Pada orasi ilmiah saat memperoleh gelar Doktor *Honoris Causa* dalam Bidang Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Rabu (25/05/2016), Megawati juga menyampaikan beberapa hal yang disebutnya sebagai "pertanggungjawaban sejarah" atas berbagai persoalan penting saat dirinya menjadi presiden.

Pertama, betulkah Sipadan – Ligitan serta merta lepas pada saat Megawati menjabat Presiden? Pada dasarnya, Sipadan – Ligitan bukan merupakan wilayah Indonesia jika didasarkan pada UU Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan. Tapi juga bukan merupakan wilayah Malaysia sehingga diperebutkan dengan berbagai argumentasi.

"Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah

di dalam sistem berpolitik di Indonesia. Padahal, persamaan hak bagi semua gender sudah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. "Di indonesia, perempuan belum mendapat kesetaraan sesuai UUD kita. Bangsa kita pun sangat mudah terjadi perpecahan dengan isu seperti ini," kata Megawati.

Dalam sejarah Indonesia, Megawati memang bukan satu-satunya perempuan Indonesia yang tampil sebagai pemimpin. Pada abad ke-14 Tribuana Tungga Dewi adalah peletak dasar zaman keemasan Majapahit. Sultanah Saifatuddin Syah di Aceh pada abad ke-16-17, merupakan sultan perempuan pertama di negeri beragama Islam itu yang mampu memegang tampuk pemerintahan hingga 35 tahun.

Megawati diakui dunia sebagai pemimpin perempuan yang kuat dalam ukuran berskala dunia. Bangsa Indonesia, tidak hanya perempuan, patut berbangga. Megawati menunjukkan bahwa perempuan pun berhak dan mampu memimpin suatu negara. Meski isu jender kadang terangkat ke permukaan seiring pencalonannya sebagai presiden, dia menjawab dengan berupaya membuktikan kepemimpinannya mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, termasuk kaum perempuan.

Seperti pernah dikemukakannya di dalam seminar nasional "Kepemimpinan wanita pada Millenium III" di Universitas Gadjah Mada tahun 1999: "Gerakan penyadaran dan pencerahan akan hak-hak kaum wanita tidak hanya melulu ditujukan kepada masyarakat kaum wanita, tetapi lebih jauh lagi justru upaya untuk melakukan pencerahan lebih diintensifkan dan diperlebar ke dalam wilayah kehidupan kaum laki-laki.

Menurut, Megawati, kaum perempuan harus dengan penuh arif dan bijak

dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris, negara yang menjajah Malaysia dan menjadi bagian dari *commonwealth*, paling awal masuk Sipadan – Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu. Putusan tersebut kebetulan ditetapkan pada 2002 saat saya menjabat sebagai presiden," jelas Megawati.

Kedua, tentang Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura. Saat itu pulau Nipah hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura. Jika pulau itu tenggelam dan hilang, wilayah Singapura akan semakin luas. "Saya segera perintahkan untuk menimbun kembali pulau itu," ujar Megawati.

Ketiga, proyek LNG Tangguh antara Indonesia dengan Tiongkok. Saat itu, tidak ada satupun negara yang mau membeli gas Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang dalam keadaan krisis, tapi dunia pun sedang dilanda resesi. Indonesia pun dalam kondisi harus bersaing dengan Rusia dan Australia yang bertetangga dengan Tiongkok dan sudah berencana membangun pipa gas ke negara tersebut.

"Saya akhirnya memutuskan melakukan *lobby* diplomatik 'Lenso Bengawan Solo' secara langsung dengan Presiden Tiongkok, Jiang Zemin. Akhirnya, Tiongkok membatalkan kerja sama dengan Rusia dan Australia, lalu memilih bekerja sama dengan Indonesia," papar Megawati.

Catatan sejarah lainnya, ujar Megawati, sedang disusun oleh para menteri Kabinet Gotong Royong. Megawati ingin tekankan sekali lagi betapa penting sejarah bagi kehidupan bangsa ini ke depan, terutama keputusan-keputusan politik

membantu kaum laki-laki agar mereka dapat bebas dari pola pikir lama yang hanya menempatkan kaum lelaki pada suatu tingkat peradaban yang memprihatinkan. "Dalam melakukan hal ini tidak perlu dijalankan dengan cara-cara yang berdampak melecehkan dan merendahkan martabat kaum laki-laki," katanya.

Megawati menawarkan suatu strategi yang meletakkan dan memosisikan wanita sebagai ibu bangsa, sebagai ibu masyarakat dan sebagai ibu sejati. Dengan pijakan strategi ini, menurutnya, maka tidak ada alasan bagi kaum wanita untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang hanya akan menimbulkan reaksi penolakan dari kaum laki-laki yang masih cenderung berpikir dan berpaling ke belakang.

Megawati juga menganjurkan agar perempuan lebih percaya diri, karena perempuan yang percaya diri tidak pernah

gentar untuk bersaing dan menyaingi kaum laki-laki dalam konteks persaingan yang sehat. Sedangkan pria yang percaya diri tidak akan pernah merasa khawatir bila bersaing dan tersaingi oleh seorang wanita.

Keberhasilan Megawati, menurut Rika Saraswati, staf Fakultas Hukum dan anggota Pusat Studi Wanita Unika Soegijapranata Semarang, tidak semata-mata

untuk mengelola pemerintahan dan negara.

Presiden Berkarakter

Saat menjabat Presiden, Megawati tak mau didikte oleh kekuatan mana pun, baik dari dalam negeri apalagi dari luar negeri. Dia dengan lantang menolak tindakan balas dendam Amerika Serikat menyerang Afganistan dan Irak, kendati dia setuju untuk melawan terorisme global.

Dia bertekad ingin membangun hubungan bilateral maupun multilateral dengan bangsa-bangsa di dunia dalam kesetaraan. Hubungan internasional, baginya, adalah mutlak tetapi harus dalam kerangka kepentingan nasional masing-masing dalam kesetaraan. Maka tak heran bila kepemimpinannya yang berkarakter kuat tak disukai negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bush, yang secara kasat mata tampak membutuhkan pemimpin boneka di negara lain, seperti di Afganistan dan Irak. Sehingga tak heran bila negara maju itu mengorbitkan bahkan mungkin saja mendanai calon pemimpin alternatif yang kemungkinan lebih mudah dikendalikan.

Di dalam negeri, keutuhan NKRI, bagi Megawati merupakan prinsip yang harus dipertahankan para pemimpin bangsa. Dia tidak ingin ada air mata dan satu nyawa pun di negeri ini yang hilang. Sebagaimana terjadi di Aceh, dia ingin tak ada air mata di negeri serambi Mekkah itu. Maka dia pun mengawali penyelesaian Aceh dengan jalan diplomasi damai. Namun, ketika jalan damai itu menemui jalan buntu, dia pun memberlakukan darurat militer.

berada di pundaknya, tetapi dipengaruhi juga oleh kinerja orang-orang di sekitarnya, kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Presiden Megawati pun mengeluarkan dua kebijakan progresif dalam pembelaan hak politik perempuan, yakni UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kesempatan bagi perempuan menempati 30% kuota dalam UU Pemilu dan partai politik baru.[5]

Dalam bukunya berjudul "Pokok-Pokok Pikiran Megawati: Bendera Sudah Saya Kibarkan" Megawati mengemukakan tujuh pokok pikiran tentang pendidikan, yang direlisasikan ketika menjabat Presiden dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini yang mengatur praktik pengadaan guru untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Juga menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.

Presiden Megawati juga membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), mereformasi hukum dan menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung.

Kepemimpinan Presiden Megawati adalah babak baru dalam ketatanegaraan dan perpolitikan Indonesia. Di mana Pancasila dan kontitusi ditempatkan sebagai cara hidup (*way of life*) dan sumber dari segala sumber hukum. Dia teguh menolak politik pragmatis dan berprinsip kuat untuk menjaga Pancasila dan konstitusi.

[5] Megawati Soekarnoputri: Meneguhkan Konstitusi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014; http://kebudayaanindonesia.net/sosok/66/megawati-soekarnoputri

Keputusan yang sesungguhnya sangat berat baginya, tetapi harus ditempuh demi keutuhan NKRI. Itu suatu keputusan seorang perempuan yang kuat.

Kepemimpinnya yang berkarakter kuat dan visioner, terlihat juga dari 'ketegaannya' menolak grasi para terpidana mati kasus narkoba. Dia mengaku sebagai seorang ibu, hatinya menangis ketika mengambil keputusan menolak grasi itu. Tapi demi masa depan anak-anak bangsa, dia harus mengambil keputusan yang secara nurani kemanusiaan sesungguhnya tak dikehendakinya.

Selain itu, kepemimpinnya yang berkarakter kuat, terlihat juga dari beberapa keputusannya yang sangat tidak populis. Keputusan mengenai kenaikan harga BBM, misalnya, yang mengikuti standar harga dunia. Beberapa tokoh dan pengamat yang mengandalkan kebijakan populis menentang kebijakan itu yang kemudian ditambangi demonstrasi beberapa kelompok mahasiswa.

Megawati tampak sangat menyadari ketidakpopuleran keputusan soal kenaikan BBM, yang berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa lainnya itu. Tetapi dia kuat dan bersikukuh mengambil keputusan itu untuk membangun kemandirian bangsa ini secara komparatif dan kompetitif dengan bangsa-bangsa di dunia. Baginya, sudah saatnya subsidi diakhiri dengan mengandalkan pinjaman (utang) luar negeri. Keputusan yang nyaris tak pernah diambil pemerintah sebelumnya, sehingga bangsa ini sulit melepaskan diri dari ketergantungan pada utang luar negeri.

:: viva.co.id

Presiden Megawati Soekarnoputri menjenguk Gus Dur yang sedang menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit. Hubungan persahabatan yang tak bisa diputus persaingan politik.

:: kebudayaanindonesia.net

Presiden Megawati Soekarnoputri ketika 'blusukan' menyalami masyarakat yang antusias menyambutnya.

Dia juga seorang yang jujur dan tulus. Antara lain terlihat ketika kampanye Pemilu Legislatif berlangsung, PT Telkom mengumumkan kenaikan tarif. Suatu tindakan naif dari kacamata politik, apalagi dari kacamata pihak yang menabukan kata kenaikan tarif dan menggantinya dengan kata penyesuaian. Tapi dia membiarkan jadual kenaikan itu bergulir apa adanya tanpa harus dipolitisir, misalnya menundanya sampai Pemilu selesai. Jika dipandang dari sudut pemimpin yang piawai merekayasa, tentu ini tindakan yang salah bahkan bodoh.

Dia juga seorang pemimpin yang berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi kepada komitmen yang telah disepakati. Lihat saja Kabinet Gotong-Royong yang pelangi dan dibentuk atas komitmen bersama lintas partai. Kendati telah nyata-nyata ada di antara menterinya telah menunjukkan sikap mendukung Capres lain, bahkan ada yang telah mengkhianati kepercayaannya, dia tetap memegang komitmen mempertahankan kabinet pelangi-nya. Padahal sebagai presiden yang menggenggam hak prerogatif untuk itu, bisa saja dia dengan mudah mengganti menteri-menteri tersebut. Hanya pemimpin berkepribadian kuat yang mampu bersikap seperti itu terhadap orang (menteri) yang bisa saja merongrong kepemimpinannya.

Bukan itu saja! Salah satu keputusannya yang kontroversial dan mengejutkan banyak pihak adalah restunya kepada Sutiyoso untuk terpilih kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pada proses pencalonan, Megawati ditekan oleh berbagai pihak agar jangan merestui Sutiyoso yang menjabat Pangdam Jaya saat terjadinya Kasus 27 Juli 1996. Demonstrasi kader dan simpatisan PDI-P marak. Tapi ketika pemilihan

berlangsung, demonstrasi simpatisan PDI-P itu berhenti. Mengejutkan para lawan politiknya. Sayang keputusan merestui Sutiyoso ini harus dibayar mahal, sebab Sutiyoso tak tampak keberpihakannya kepada wong cilik, basis massa PDI-P. Namun dari kasus ini, sebagai seorang pemimpin, Megawati telah menampakkan sosoknya yang kuat dengan kepribadiannya sendiri.

Dengan intensitas kontroversi yang hampir sama, adalah desakan publik agar dia mengganti Jaksa Agung. Namun, dia seperti tidak terpengaruh dengan masih mempertahankannya. Jika ingin mengambil tindakan populis saja, seorang pemimpin sudah akan mengganti Jaksa Agung itu. Namun, tampaknya Megawati melihat bahwa saat itu Jaksa Agung bukan satu-satunya titik lemah penegakan hukum di negeri ini. Menurutnya, banyak kasus korupsi yang telah dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan, ternyata di pengadilan divonis bebas.

Bukti lain kepemimpinnya yang berkarakter kuat adalah kerelaannya menerima keputusan politik SU-MPR 2001 yang memenangkan KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan keikhlasannya menerima jabatan Wakil Presiden, kendati PDIP sebagai pemenang Pemilu. Hanya saja duet 'bersaudara' ini tak bertahan lama akibat keteledoran Gus Dur yang tampak terlalu meremehkannya.

:: detik.com

Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Nelson Mandela

Bukan saja Gus Dur yang pernah terkesan meremehkan kemampuan kepemimpinan Megawati. Beberapa politisi dan pengamat juga seringkali menganggapnya lemah dan tak punya visi. Padahal jika dicermati secara jujur, dia seorang pemimpin yang kuat, yang berani mengatakan ya atau tidak pada waktunya. Visioner, konsisten dan tidak mencla-mencle.

Hanya saja, sifat pendiamnya, yang selain merupakan kekuatan juga menjadi kelemahan. Karena dikesankan seolah-olah kurang berkomu-

Presiden Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas bersama Lee Kwan Yew

nikasi dengan rakyat. Sehingga lawan-lawan politiknya memanfaatkan sifat pendiam itu sebagai pertanda kelemahan dan ketidakmampuan. Padahal, diamnya Megawati itu adalah caranya dalam mendengarkan, menyerap, menganalisis dan menerima masukan demi kesejahteraan rakyat. Jiwa besarnya, kesabarannya, yang selalu diam tatkala dicaci-maki, makin bercahaya saat dia menyadari kelemahan diamnya, selain merupakan kekuatannya.

Presiden Megawati Soekarnoputri membuat beberapa kebijakan penting sepanjang selama tiga tahun pemerintahannya. Antara lain, penguatan infrastruktur untuk pemberdayaan rakyat, dimana fokus perhatiannya tertuju pada kesejahteraan rakyat. Dia memperkuat Departemen Kelautan dan Perikanan. Karena dia memandang potensi perikanan dan kelautan merupakan salah satu cara mempercepat pemulihan kondisi perekonomian negara. Pemerintahannya berupaya meningkatkan produktivitas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan.

Megawati juga fokus dalam memerangi terorisme dan menjaga integrasi bangsa. Ketika menjabat presiden, Megawati dihadapkan dengan sejumlah konflik di Aceh, Poso, Maluku dan Papua. Dia berupaya keras mengatasinya dengan pendelegasian yang jelas kepada para menterinya. Selain itu, kebijakan desentralisasi kekuasaan dalam bentuk otonomi daerah pun diterapkan, dengan harapan dapat menyelesaikan konflik antar golongan yang terjadi selama bertahun-tahun, juga menetapkan status darurat militer serta Operasi Terpadu di Aceh.

■ **crs - TokohIndonesia.com**

::tribunnews.com

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sang Negarawan, The Great Queen Maker

Kiprah politik Megawati Soekarnoputri telah membuktikan dirinya sebagai negarawan. Kenegarawanannya makin bercahaya terang benderang saat dengan legowo menempatkan dirinya sebagai Queen Maker dalam pentas politik nasional, terutama dalam Pilpres 2014.

Pada Pileg 2014, PDI Perjuangan, yang dipimpin Megawati, dipercaya rakyat menjadi pemenang, meski tidak dengan perolehan suara dominan. Sebagaimana lazimnya di negeri ini dan di banyak negara, pemimpin partai pemenanglah yang sepantasnya menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara (Capres, Presiden atau Perdana Menteri).

Maka dalam Pilpres 2014, yang diselenggarakan seusai Pileg, sepatutnyalah Megawati Soekarnoputri diusung partai yang dipimpinnya menjadi Capres. Apalagi dia sendiri telah diberi mandat oleh Kongres Partai-nya untuk menetapkan siapa Capres pada Pilpres 2014. Tapi tidak demikian adanya. Megawati justru memberikannya kepada kader terbaiknya, Ir. Joko Widodo, yang populer dengan panggilan Jokowi. Si Kerempeng (DNA Marhaen) dari Solo. Seorang kader (petugas partai ideologis) yang dari segi pengalaman masih terbilang 'bau kencur' dalam pentas politik nasional. Dia memang Walikota fenomenal di Solo dan gemilang memimpin DKI Jakarta kendati baru masih hampir dua tahun.

Mengapa Megawati mau menyerahkan peluang itu kepada Jokowi? "Saya kok tidak yakin ada ketua umum partai yang malah menyodorkan nama orang lain sebagai calon presiden – sekalipun partai itu mengaku paling demokratis atau reformis sekalipun," tulis Ari Junaedi (wartawan yang sudah lama dekat dengan Megawati) dalam buku Megawati dalam Catatan Wartawan Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat.[1]

Pendapat Ari Junaedi ini cukup menggambarkan pendapat kebanyakan orang (kelaziman). Apalagi para politisi, terutama politisi yang masih cenderung pragmatis dan transaksional. Tapi, Megawati melakukan suatu hal yang yang sulit (mustahil) dilakukan orang lain (pimpinan partai lain). Hal itu hanya mungkin dilakukan oleh pimpinan partai yang sudah mencapai level terhebat sebagai negarawan.

Sejarah akan mencatat, Megawati-lah pimpinan partai politik (pemenang pemilu) pertama di negeri ini yang dengan kenegarawannya menyerahkan mandat dan peluang kepada orang lain (kader terbaiknya) untuk menjadi Presiden.

Mengapa Megawati percaya me-

[1] Kristin Samah (Editor), Megawati dalam Catatan Wartawan Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm.97.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPP - PDI PERJUANGAN)

PERINTAH HARIAN : MERDEKA!

Saya, Ketua Umum Partai :
Demokrasi Indonesia Perjuangan

" Kepada seluruh rakyat INDONESIA yang mempunyai mata hati, keadilan & kejujuran dimanapun kalian berada! "

1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai CALON PRESIDEN dari :
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2. Jaga dan amankan jalannya Pemilu Legislatif - terutama di TPS2 dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan, & intimidasi.
3. Teguh & tegarkan hati dalam mengawal DEMOKRASI & REPUBLIK INDONESIA tercinta!

Mutiara
(Megawati Soekarnoputri)

14 MARET 2014

Sekretariat : Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan 12610, Telp. : (021) 7806028, 7806032 (Hunting) Fax. : (021) 7814472

:: merdeka.com

Ketua Umum PDI-P Megawati didampingi Puan Maharani dalam temu pers pemberian mandat Capres 2014 kepada Jokowi

nyerahkan mandat itu kepada Jokowi? Orang kebanyakan (termasuk yang menamakan diri pengamat) menyebut karena elektabilitas Jokowi sudah lebih tinggi, termasuk dibanding Megawati sendiri. Pendapat ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal Megawati. Benar, elektabilitas salah satu faktor, tapi itu adalah pandangan pragmatis semata. Jejak rekam politik Megawati menunjukkan, dia bukanlah politisi yang berpikir pragmatis semata, bahkan dia lebih berpendirian sebagai pemimpin partai ideologis. Jadi, pastilah alasan utamanya adalah alasan garis perjuangan ideologis.

Kesetiaan kepada Pancasila dan Trisakti Bung Karno pastilah lebih dominan yang membuka kelogowoan Megawati memberikan mandat kepada Jokowi. Megawati sudah pasti telah mengenal dan sudah lebih dulu yakin bahwa Jokowi adalah kader PDI Perjuangan (partai ideologis) militan yang akan memegang amanah Pancasila dan Trisakti Bung Karno, untuk mempercepat terwujudnya cita-cita proklamasi.

Megawati sudah pasti lebih dulu yakin petugas partai ideologis Jokowi akan memegang amanah menjadi seorang Presiden RI yang negarawan. Dalam pandangan Megawati, seorang negarawan adalah prasyarat pokok untuk mempimpin Indonesia. "Bagi saya, sosok negarawan hanya bisa lahir kalau ia benar-benar memahami sejarah, memahami Pancasila dan UUD 1945. Memahami budaya masyarakatnya yang plural serta setia terhadap NKRI," ujar Megawati.[2]

[2] Megawati Soekarnoputri dalam seminar nasional 'Merindukan Negarawan' yang digelar di Jakarta, Kamis (24/5/2012).

:: pdiperjuangan.or.id

Launching kampanye Pilpres 2014, dimana PDI Perjuangan resmi mengusung Jokowi sebagai Capres.

Presiden RI kelima itu mengatakan, seorang negarawan harus bisa memberikan inspirasi dan mampu menggelorakan kembali kebanggaan sebagai bangsa. "Seorang negarawan harus mampu melihat secara jernih agar subyektifitasnya sesuai dengan kondisi obyektif bangsanya," kata Megawati.

Mereka yang berpikiran positif, memuji kenegarawanaan Megawati tersebut. Mantan panglima TNI Jenderal (purn) Djoko Santoso menilai, keputusan itu merupakan keputusan cerdas. "Beliau tahu dengan pasti bagaimana menentukan keputusan penting. Megawati merupakan sosok negarawan sejati. Mega bisa memahami aspirasi publik yang menginginkan Jokowi menjadi presiden. Beliau itu *the real ideology*, hidup sebagai ideologi, mengabdi pada negara," kata Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso.[3]

Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh juga memuji Megawati. "Saya berpendapat ini menunjukkan Megawati Soekarnoputri adalah seorang negarawan yang hebat. Sebagai pemimpin partai, Megawati telah berani membuat gebrakan-gebrakan yang berani dan luar biasa dalam memunculkan tokoh-tokoh muda. Karena itu, sikap seperti ini harus mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya demi regenerasi kepemimpinan di Indonesia ini," kata Poempida.[4]

Jusuf Kalla, politisi senior Partai Golkar yang mendamping Jokowi sebagai Wakil Presiden menyebut Megawati sebagai negarawan hebat. Megawati tidak seperti ketua umum partai lainnya, yang sudah mendeklarasikan diri sebagai capres atau cawapres, meski perolehan suara partainya tak sampai satu persen atau di bawah lima persen. Meski PDI Perjuangan mendapatkan suara hampir 20 persen pada pemilu legislatif kemarin, Megawati sebagai ketua umum tetap mendengarkan

[3] Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso saat menghadiri peresmian LBH Pandu Bangsa di Yogyakarta, Rabu 19/03/2014.

[4] Poempida Hidayatulloh, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, di Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

kehendak rakyat dalam memutuskan siapa yang diusung pada Pilpres 2014. Kemudian, Megawati minta saya mendampingi Jokowi, padahal saya berbeda partai. Apa kurangnya kenegarawanan Megawati? Ini luar biasa. Enggak ada yang seperti itu kecuali Ibu Mega," kata Jusuf Kalla kepada *TokohIndonesia.com*, Senin (19/5/2014).

Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi mengatakan sikap negarawan Megawati yang memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada tokoh muda Jokowi akan dicatat dalam tinta emas sejarah Indonesia.[5]

Mantan Ketua MPR dari PDIP Sidarto Danusubroto juga memuji kebesaran hati Megawati. Megawati disebutnya sebagai negarawan sejati yang telah membuat keputusan sejarah yang bijak untuk bangsa dan negara, dengan memberikan mandat kepada Joko Widodo sebagai Capres 2014-2019. Sidarto berharap Jokowi tetap bersikap konsisten dengan apa yang sudah ditunjukkan selama ini yakni jujur, sederhana, rendah hati, dan merakyat.[6]

Jalan Politik Negarawan

Sesungguhnya, Megawati sejak awal memilih jalan politik sebagai medan perjuangannya, telah diasah ajaran Bung Karno, ayahandanya sendiri, untuk menjadi negarawan. Berulangkali Megawati mengatakan partai bukanlah perusahaan, tapi alat perjuangan, demi bangsa dan negara.

Sekadar contoh, *TokohIndonesia.com* mencatat beberapa sikap dan tindak politik Megawati yang membuktikan dirinya negarawan.

Pertama, kendati sedemikian kejam tekanan politik penguasa Orde Baru (Presiden Soeharto), yang diterima ayahhandanya (Bung Karno) dan keluarganya terutama dirinya sendiri (sampai-sampai dia tidak bisa melanjutkan studi dan jenazah suami pertamanya pun tak diketahui rimbanya), Megawati sama sekali tidak pernah menghujat Pak Harto apalagi balas dendam. "Jangan ada dendam atau saling balas seperti di film kungfu" kata Megawati.[7]

"Saya tidak setuju dengan sikap Pak Harto memperlakukan keluarga saya, bapak saya, karena ada suatu perlakuan terhormat yang seharusnya diberikan, apapun juga, kepada seorang presiden. Karena dia adalah pemimpin bangsa," kata Megawati.

Namun, Megawati tidak menghendaki terjadi siklus kebencian dan balas dendam. Dia lebih mementingkan masa depan, menatap dan menapaki perjalanan bangsa dengan meletakkan fondasi dasar pembangunan yakni *"nation and character building"* yang diwariskan Bung Karno. "Kita harus konsisten dalam berjuang. Politik itu tidak kotor. Bukan politik yang kotor, tapi orangnya yang kotor," tutur Megawati.

Sikap politik tanpa dendam ini bukan tanpa kosekuensi. Sebab sikap politik tersebut disalahmengerti oleh berbagai pihak, termasuk para pencinta ajaran Bung Karno.

Kedua, kendati dia (PDI dan PDI Perjuangan) mengalami tekanan politik yang berpuncak pada terjadi-

[5] Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi, kepada pers Jumat (14/3/2014).

[6] Ketua MPR dari PDIP Sidarto Danusubroto dalam siaran pers, Senin (14/3/2014)

[7] Megawati Soekarnopuytri ketika menjadi narasumber di acara talkshow Kick Andy, MetroTv, 20 dan 28 Desember 2008.

nya Kasus 27 Juli 2006 (Kudatuli), Megawati juga tidak membalas kebencian dan dendam. Bahkan, sangat mengejutkan tatkala dia (PDI Perjuangan) mencalonkan kembali Sutiyoso (Pangdam Jaya ketika Kudatuli terjadi) untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta periode kedua (2002-2007).

Saat itu, pemilihan gubernur masih dilakukan DPRD. Dan, PDI-P memiliki 35% kursi di DPRD I Jakarta. Dengan hanya berkoalisi dengan PPP (dipimpin Hamzah Haz, Wapres) maka calon PDI-P (kader PDI-P) sudah pasti (di atas 50%, 43 dari 85 kursi) memenangkan pemilihan gubernur. DPD PDI-P Jakarta pun sudah menggadang-gadang calonnya.

Tetapi dengan amat mengejutkan, Megawati memilih Sutiyoso. Jangankan publik, Sutiyoso sendiri mengaku amat kaget ketika dia dipanggil Presiden Megawati dan menyatakan PDI-P akan mencalonkannya untuk periode kedua. "Saya kaget seperti orang kesetrum. Ibarat bakso Senayan yang panas dan enak, tinggal di santap saja, tapi koq rela dikasihkan orang lain," pengakuan Sutiyoso.[8] Sebab, Sutiyoso sebelumnya sama sekali tidak menduga bakal dicalonkan PDI-P.

Di tengah kekagetan, keharuan dan kebanggaan Sutiyoso, Presiden Megawati menjelaskan bahwa dia telah berembug dengan Wapres Hamzah Haz untuk mencalonkan Sutiyoso. "Saya tidak mau mengambil risiko demi kepentingan ibukota negara," kata Megawati.

Sutiyoso bertanya untuk meredakan kekagetannya: "Apa Ibu sudah yakin atas keputusan mencalonkan saya kembali?" Sebab sepengetahuannya, PDI-P dan PPP sudah menggadang-gadang calonnya. Apa jawaban Megawati? "Itu urusan saya. Ini bukan masalah kepentingan partai, tapi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa," kata Megawati, yang saat itu antara lain ingin menjamin keberlangsungan Pemilu dan Pilpres pertama langsung oleh rakyat 2004, tidak untuk kepentingan politiknya sendiri.

Keputusan ini sangat sulit dipahami oleh politisi biasa, apalagi politisi pragmatis dan transaksional. Bahkan, Megawati dianggap 'mengkhianati' para pendukungnya yang menjadi korban Kudatuli. Bahkan dia dicaci tidak mau turun tangan untuk menyelesaikan (mengusut tuntas) masalah tersebut. Bagi Megawati, masalah Kudatuli sudah menjadi ranah hukum. Tidak baik kalau ditarik-tarik menjadi urusan politik balas dendam.

Ketiga, Megawati ketika menjabat Presiden RI sama sekali tidak membawa gerbong PDI-P ke Istana. Dia lebih memilih birokrat berpengalaman menjabat Menteri Sekretaris Negara. Sama sekali tidak ada jabatan penting yang dipegang PDI-P di lingkungan Istana. Kendati sesungguhnya, membawa kader-kader terbaik partainya ke istana adalah hal yang sepantasnya. Tapi dia memiliki pertimbangan di atas nilai kepantasan itu.

Keempat, pemberian mandat (penugasan partai) kepada Jokowi untuk mengemban amanat rakyat menjadi Presiden Ketujuh. PDI-P sebagai pemenang Pemilu 2014 tidak mencalonkan ketua umumnya

[8] Drs. Ch. Robin Simanullang, Biografi Kepemimpinan Sutiyoso, Sang Pemimpin, Gubernur DKI Jakarta di Masa Sulit, Era Lima Presiden, Pustaka Tokoh Indonesia, 2014, hlm.143-154

Jokowi dan isteri bersama Megawati dengan dua anaknya Puan Maharani dan Prananda Prabowo saat di TPS Pilpres 2014 yang dimenangkan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI)

sendiri, tetapi Sang Ketua Umum menyerahkan mahkota itu kepada kader terbaiknya, Jokowi. *(Baca: Petugas Partai Ideologis)*. Bandingkan dengan partai lain yang sudah menggelar konvensi Capres karena ketua umumnya tak dibolehkan UU untuk mencalonkan diri, urung mengajukan Capres karena yang menang konvensi bukan kerabatnya atau alasan lain.

Itulah empat contoh tindak politik hebat Megawati negarawan. Maka sangat keliru dan kerdil jika ada orang yang masih memandang remeh Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana dikemukakan Jaya Suprana, budayawan serta pendiri MURI: "Kalau sampai ada orang yang menduga bahwa Mega itu tidak cerdas, saya kira orang itu yang tidak cerdas". Sejak awal saya bertemu dengan beliau, saya terkagum-kagum atas kecerdasan beliau. Beliau memiliki kecerdasan estetika. Seperti, peran beliau di Kebun Raya yang menunjukkan kecintaan beliau kepada alam ini. Kedua, apa yang dia ucapkan mengenai pengampunan dan kasih sayang dalam politik. Semua itu adalah estetika. Kita lupa bahwa politikpun bisa berestetika. Dan itu yang ditunjukkan Megawati."[9]

Secara akademik, Universitas Padjadjaran juga mengapresiasi kiprah politik Megawati. Unpad menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa bidang politik dan pemerintahan kepada Presiden Kelima RI itu, Rabu, 25 Mei 2016. Rektor Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad mengatakan gelar ini diberikan kepada Presiden kelima RI itu sebagai bentuk pengakuan atas pencapaiannya yang dinilai mampu membawa stabilitas politik pada masa transisi demokrasi. Apalagi sisi pemikiran dan kiprah Megawati sebagai seorang pemimpin memiliki sisi nilai akademik yang bermanfaat. Pada kesempatan itu, Megawati menyampaikan orasi berjudul: *Bernegara dengan Satu*

[9] Jaya Suprana, budayawan dan pendiri MURI mengemukakan hal itu di acara Kick Andy, Metro Tv, 28 Desember 2008.

:: pdip.doc

Megawati Soekarnoputri pada acara talkshow Kick Andy

Keyakinan Ideologi.

Ketua Tim Promotor Prof. Obsatar Sinaga menyampaikan pertanggungjawaban ilmiah terkait penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang politik dan pemerintahan pada Megawati Soekarnoputri tersebut.[9] Prof. Obsatar Sinaga mengatakan tim dari Unpad melakukan proses analisis dan pengamatan mencakup tiga periode kepemimpinan Megawati sebelum menjadi presiden, ketika menjadi presiden dan setelah menjadi presiden. "Sosok Megawati Soekarnoputri menarik bukan hanya karena prosisinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang menjabat selama periode 2001-2004, tetapi juga karena latar belakang keluarganya dan perjalanan karir politiknya yang tepat berada dalam jalur transisi demokrasi di Indonesia," ujar Obsatar.

Menurut Obsatar, salah satu pemikiran dan kebijakan Megawati Soekarnoputri yang pengaruhnya dirasakan hingga saat ini, adalah melahirkan kebijakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi cikal bakal lahirnya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

Disebutkan, dalam perspektif keilmuan, khususnya Ilmi Politik, sosok Megawati juga memiliki daya tarik tersendiri. Obsatar mengatakan sebagai aktor politik, Megawati pernah berada dalam posisi termarginalkan oleh kekuatan rezim yang otoriter, kemudian bangkit dan berhasil menggantikan rezim tersebut. Kemudian, setelah tidak lagi menjabat presiden, bisa melahirkan kader terbaiknya menjadi presiden. Tapi ketika partai politik yang dipimpinnya berkuasa, Megawati tetap menjadi sosok yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Joko Widodo, Presiden yang berasal dari partainya. Ini dinilai sangat menarik dari segi keilmuan.

Inilah gelar Doktor Honoris Causa keempat diterima Megawati. Sebelumnya, Megawati juga telah memperoleh gelar Doktor Honoris Causa bidang Hukum dari Waseda University, Tokyo, Jepang (2001), bidang Politik dari Moscow State Institute of International Relations, Rusia (2003), dan bidang Politik dari Korea Maritime and Ocean University, Korea Selatan (2015).

Dia memang seorang politisi dan negarawan, yang juga telah menjadi *The Great Queen Maker,* pentas politik nasional. Keputusannya ditunggu, baik oleh kawan maupun lawan *(counterpart)* politiknya, karena akan sangat berpengaruh pada jalannya pergerakan politik di Indonesia. Harus diakui, suka atau tidak, Mbak Mega adalah politisi yang paling berpengaruh saat ini.

■ **crs | TokohIndonesia.com**

[9] Ketua Tim Promotor Prof. Obsatar Sinaga di Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung pada Rabu (25/5/2016).

Petugas Partai Ideologis

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa semua kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif maupun di struktur partai di semua tingkatan adalah petugas partai. "Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai. Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai," tegas Ketua Umum PDI Perjuangan itu.[1]

Sontak penegasan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Para pihak yang tidak (berusaha) memahami makna petugas partai tersebut menanggapinya amat negatif. Mereka menilai kata (frasa) petugas partai itu sangat merendahkan kader partai yang menjabat di legislatif dan eksekutif, terutama Presiden Jokowi. Karena sebelumnya, Megawati sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengikuti perjuangan dan kebijakan partai.

Para pihak eksternal PDI Perjuangan amat 'galak' mencibir penegasan petugas partai oleh Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Mereka keberatan karena menganggap Presiden Jokowi direndahkan dengan sebutan petugas partai. Terutama cibiran dari mereka yang sesungguhnya tidak menginginkan Jokowi jadi Presiden RI. Seolah-olah mereka lebih bangga dan lebih menghormati Presiden Jokowi, melebihi rasa bangga dan rasa hormat Megawati dan kader/simpatisan PDI Perjuangan sendiri.

[1] Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan menegaskan hal itu pada pidato penutupan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Sanur, Bali, Sabtu, 11 April 2015.

Presiden Jokowi bersama Megawati sehati sepikir dalam Pancasila dan Trisakti yang dijabarkan Jokowi dalam Nawacita

Memang, jika frasa petugas partai itu dipandang dari sisi pragmatis dan sektarian, bisa dipahami jika para pihak memaknainya negatif. Maka untuk memudahkan memahami hakikat petugas partai yang dimaksud, mesti diawali pengenalan dan keyakinan tentang apa sesungguhnya ideologi, visi dan garis perjuangan PDI Perjuangan? Bagi mereka yang mengenal dan memahami keberadaan PDI Perjuangan sebagai partai kader dan partai ideologis (Pancasila), nasionalis (kebangsaan), akan mudah memahami makna ideologis petugas partai tersebut secara positif. Tapi bagi mereka yang bersudut pandang pragmatis dan sektarian akan selalu (sampai kapan pun) melihatnya negatif, apabila nereka hanya bercermin pada diri sendiri.

Sementara, dalam pengamatan *Redaksi TokohIndonesia.com*, para kader PDI Perjuangan sendiri, terutama Presiden Jokowi, sangat memahami makna frasa petugas partai tersebut, sehingga justru mengamininya sebagai amanah yang harus dipegang teguh.

Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan pengamatan tersebut, *TokohIndonesia.com* mempunyai cerita (Maret 2011) ketika 'menantang' Jokowi apakah berani bertarung menjadi Calon Gubernur DKI. Ketika itu, Jokowi masih menjabat Walikota Solo. Setelah melakukan peninjauan ke beberapa sudut kota Solo dan wawancara dengan Jokowi, *Wartawan TokohIndonesia.com* berkesimpulan bahwa kepemimpinan Jokowi ini sangat fenomenal.

Maka dalam percakapan lanjutan, *TokohIndonesia.com* menantang dengan satu pertanyaan: "*Berani gak jadi Gubernur DKI Jakarta?*" Jawaban pertama yang kami terima: "*Wah, itu urusan orang-orang besar, kita orang kecil dan bodoh.*" (Saat itu, Gubernur Jawa Tengah menyebutnya bodoh, karena menolak pembangunan *mall* di Solo. Hal ini pula yang mendorong kami menyuratinya untuk wawancara).

Pertanyaan itu kami ulang-ulang dengan memberi penjelasan bahwa jika dia berani menjadi Gubernur DKI, maka (model kepemimpinannya) akan mengubah Indonesia. Kami belum mengatakan dia bakal menjadi presiden, tapi model kepemimpinannya akan menjadi panutan bagi para pemimpin (walikota, bupati, gubernur dan presiden) di negeri ini.

Akhirnya, dia mulai membuka diri dengan menanggapi lebih dulu makna pertanyaan kami '*berani gak?*' Soalnya Solo itu kota kecil dan lebih homogen dibanding metropolitan Jakarta yang sangat heterogen. Apa kata Jokowi? "*Berarti Anda belum kenal Solo. Tahukah Anda? Balai Kota Jakarta belum pernah dibakar massa, Balai Kota Surakarta sudah dua kali dibakar.*"

"*Jadi, kalau begitu, berani gak Anda jadi Gubernur DKI Jakarta?*" tanya *TokohIndonesia.com*

Megawati Soekarnoputr bersama Presiden Jokowi kader PDI Perjuangan terbaik, bersama Puan Maharani dan Tjahyo Kumolo.

Megawati Soekarnoputr bersama Presiden Jokowi dan keluarga dalam percakapan santai laksana 'sahabat ibu-anak'.

lagi. Kali ini Jokowi makin terbuka. Dia mengatakan sebenarnya DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta sudah mengirim formulir pendaftaran kepadanya. Tapi dia tidak mau mengisi dan mengembalikannya. *"Saya tidak mau mendaftar, sebagai kader, jabatan adalah amanah. Tapi, jika partai menugaskan, kita akan fight untuk menang, yakin menang!"* Kami pun bersalaman.

Jawaban Jokowi itu kami garisbawahi: "***Jika partai menugaskan***." Bagi kami saat itu, jawaban itu mengandung makna bahwa Jokowi adalah kader partai militan yang sangat memahami eksistensi seorang anggota partai. Kami memandangnya sebagai seorang kader PDI Perjuangan yang mempunyai DNA si Marhaen, sang petani yang dijadikan Bung Karno sebagai *icon* perjuangan rakyat jelata (wong cilik).

Maka ketika Mbak Mega menegaskan kader PDI Perjuangan sebagai petugas partai, kami langsung teringat pernyataan Jokowi *'jika partai menugaskan'* tersebut. Itu adalah ucapan Jokowi. Bukankah Jokowi sendiri pun lebih memilih penugasan partai daripada dia sendiri yang mendaftarkan diri sendiri? Penugasan partai bagi Jokowi adalah amanah untuk mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa dan negara, sesuai ideologi, visi, misi dan garis perjuangan partai.

Jelas, PDI Perjuangan adalah partai ideologis (Pancasila). Garis perjuangan PDI Perjuangan adalah Trisakti, yang menjadi visi Presiden Jokowi dan kemudian dijabarkannya dalam Nawacita.

Bukankah Trisakti dan Nawacita itu merupakan implementasi dari amanah petugas partai yang dimaksud? Itulah personifikasi Jokowi sebagai petugas partai ideologis. Bahkan lebih tegasnya, Jokowi berulangkali menegaskan kepada jajaran Kabinet Kerja-nya bahwa hanya Presiden-lah yang punya visi

TokohIndonesia.com ketika berbincang dengan Jokowi. Jokowi bilang: "Jika partai menugaskan, kita siap bertarung dan yakin menang."

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, berbicara di hadapan peserta Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDI-P

(Trisakti dan Nawacita), para menteri tidak. Trisakti dan Nawacita itulah visi yang harus diwujudkan semua menteri. Tahukah Anda Trisakti tersebut? Itulah garis perjuangan PDI Perjuangan yang diwarisi dari perjuangan Bung Karno. Yang oleh Presiden Jokowi dijabarkannya dalam sembilan pokok perjuangannya, yang disebutnya Nawacita.

Insinuasi

Maka, ketika ada pihak (politisi dan pengamat) yang menyindir dan menggembar-gemborkan adanya kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati (PDI-P), hanya karena ada masukan dan kritik, bisa saja hal itu hanya insinuasi mereka atau bahkan suatu hal yang sesungguhnya mereka kehendaki menjadi kenyataan. Namun, menurut pengamatan *TokohIndonesia.com*, 'keinginan busuk' seperti itu sangat jauh panggang dari api.

Insinuasi dan 'keinginan busuk' seperti itu, hanya mungkin muncul dari mereka yang tidak berusaha memahami Megawati, Jokowi dan PDI-P. Seperti ketika ada relawan Pro Jokowi (Pilpres) kemudian berkeinginan mendirikan Partai Jokowi (2015) dan anehnya ada lagi relawan yang mendirikan Partai Indonesia Kerja (2016) yang katanya untuk Jokowi. Itu adalah keinginan mereka yang tidak mengenal Jokowi.

Insinuasi dan mimpi politik terbaru juga terindikasi dalam Rapimnas Golkar yang menyatakan secara resmi akan memengusung Jokowi jadi Capres 2019, serta secara insinuasi siap membentengi Jokowi dari serangan politik partai lain, termasuk PDI-P.

Jika benar ada pikiran seperti ini, pastilah pikiran itu buta dan picik. Padahal Presiden Jokowi sudah menunjukkan apa yang sepatutnya dia lakukan ketika diminta hadir oleh Golkar untuk menerima dukungan tersebut. Jokowi datang menghadirinya, tetapi dia tidak datang sendiri. Jokowi menjemput Megawati dan datang dalam satu mobil. Bagi mereka yang kenal Jokowi, pastilah sudah paham makna terdalam kenapa dia menjemput Megawati. Dan, Megawati yang kenal Jokowi, pastilah sudah paham maknanya, kendati tidak terucapkan dalam kata-kata.

Tetapi hati dan pikiran insinuasi sangat tidak bisa (tidak mau) melihat dan memaknai hal ini. Justru yang disorot, termasuk oleh media, adalah 'nebengnya' Ahok dalam mobil yang sama. Seolah-olah Jokowi menjemput Megawati demi Ahok. Suatu nalar yang berkualitas di bawah standar.

Memang, memahami orang lain dari sudut pandang orang lain itu, hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang bijaksana. Dan, orang picik akan mencibirnya.

■ **crs-tim | TokohIndonesia.com**

PDI-P Partai Ideologis

MEGAWATI POLITISI PANCASILA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai yang paling konsisten menampilkan keberadaannya sebagai partai ideologis (Pancasila) dan partai yang mempunyai garis perjuangan yang jelas, yakni Trisakti. Hal ini terjadi, menurut Presiden Jokowi adalah berkat keteguhan hati dan prinsip kuat yang dijaga oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati adalah politisi Pancasila yang paling konsisten. Puteri Bung Karno itu adalah personifikasi dari PDI Perjuangan.

Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang konsisten menjaga ideologinya dan berhasil berkuasa di Indonesia. Jokowi menegaskan PDI Perjuangan tetap konsisten menjadi partai ideologis, mampu menjaga soliditias, dan menjadi partai yang kuat dan berkuasa di Tanah Air.[1]

Menurut Jokowi, semuanya itu tidak akan terjadi tanpa keteguhan hati dan prinsip kuat yang dijaga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Semua itu terjadi, menurut pendapat saya, karena PDIP dijaga keteguhan hatinya dan sikap yang berprinsip dari ketua umumnya, Ibu Megawati Soekarnoputri, dalam menegakkan fatsun-fatsun politiknya. Dan tentu saja, didukung oleh kader-kader yang ulet dan tahan banting dari seluruh PDIP," katanya.

Megawati berhasil memimpin PDI Perjuangan sebagai partai ideologis (Pancasila) dimana ideologi tersebut berfungsi sebagai penggerak dan pengarah perjuangan seluruh komponen partai. Megawati menegaskan sebuah parpol hanya akan dapat bertahan jika memiliki ideologi yang menjadi pemersatu perjuangan, penggerak, dan pengarah berbagai aktivitas dan kebijakan organisasi.

Dengan ideologi itu, sebuah parpol akan berdiri kokoh karena akan tetap diingat dan mendapatkan dukungan rakyat meski ada upaya untuk "menghantam" parpol tersebut.

Kondisi itu telah dialami PDI Perjuangan ketika ada upaya siste-

[1] Presiden Joko Widodo dalam pidato sambutan pada acara Hari Ulang Tahun ke-43 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan periode 2015-2020 di Hall D, Jakarta Internasional Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1/2016).

:: pdip.doc

Pidato Politik Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDI Perjuangan, Januari 2016

matis dan rezim yang ingin menghapuskan identitas dan sejarah kepartaian parpol tersebut.

"Kita dihantam ke kiri dan ke kanan, atas dan bawah, dan dari segala penjuru bagaikan palu raksasa yang mengerdilkan bangunan kepartaian dan mentalitas perjuangan kita. Namun, dengan ideologi yang sesuai dengan ruh kerakyatan, PDI Perjuangan mampu lolos dalam menghadapi tantangan dan masa sulit tersebut," kata Megawati Soekarnoputri.[2]

Megawati menjelaskan ideologi yang dipegang teguh PDI Perjuangan adalah Pancasila yang memiliki lima prinsip bangsa yang membumi dan sesuai dengan nilai kerakyatan bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila yang dipegang teguh PDI Perjuangan tersebut tidak hanya berbicara tentang demokrasi politik, tetapi juga sosiodemokrasi, ekonomi, dan kebudayaan. "Itulah sebuah gagasan besar yang menjadi sumber keyakinan kehidupan kepartaian kita," katanya.

Dalam kesempatan lain (HUT 42 PDIP), Megawati Soekarnoputri, dalam perintah hariannya, menegaskan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun berada diminta untuk tetap setia dalam garis ideologi partai untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan (Trisakti). Megawati juga meminta kadernya untuk mewujudkan PDI Perjuangan sebagai Partai Pelopor yang bisa menjadi suluh perjuangan rakyat. [3]

"Perkuat konsolidasi Partai Untuk mewujudkan Partai Pelopor dalam menjalankan fungsi partai di dalam kaderisasi, rekrutmen anggota, pendidikan politik, komunikasi politik, dan agregasi kebijakan. Semua anggota partai meluruh dalam asas kolektivitas untuk ra-

[2] Perintah harian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dibacakan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Brilian Moktar yang menjadi inspektur upacara dalam peringatan HUT PDI Perjuangan ke-41 di Medan, Jumat [10/01/2014].

[3] Perintah Harian Ketua Umum DPP PDIP itu dibacakan Ketua DPD PDIP Jatim H Sirmadji Tjondropragolo dalam pidato sambutan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-42 PDIP di pelataran DPD PDIP Jatim, Surabaya, Sabtu, Sabtu, 10 Januari 2015.

kyat," kata Megawati.

Megawati juga memerintahkan kadernya untuk memberikan dukungan pada kepemimpinan Ir Joko Widodo dan Drs H Jusuf Kalla. Dukungan itu untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dikenal dengan Trisakti Bung Karno yakni Indonesia Raya yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan berlandaskan pada gotong royong.

Selain perintah untuk tetap dalam ideologi partai untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan (Trisakti), Megawati dalam perintah hariannya juga meminta kadernya untuk mewujudkan PDI Perjuangan sebagai Partai Pelopor yang bisa menjadi suluh perjuangan rakyat. Megawati menegaskan partai bukanlah perusahaan, tapi alat perjuangan.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai yang memiliki ideologi dan panduan atau konsep yang jelas. Pemilu 2014 membuktikan hal tersebut, ketika ajaran Trisakti dikedepankan kembali melalui 9 program Nawacita.[4]

Sementara, dosen politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi, menilai PDI Perjuangan (PDIP) pada usianya yang ke-42 (10 Januari 2015) menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang tetap kukuh dengan diskursus ideologi nasionalisme kewargaan/keindonesiaan. Dia berpendapat penting bagi PDIP untuk tetap merevitalisasi ideologinya itu. "Karena hanya dengan prinsip ideologi partai politik itu punya makna dan tuntunan dalam beraktivitas sebagai kekuatan politik. Dengan basis empirik sebagai partai ideologis, bahkan mungkin saja PDIP dapat menjadi role model bagi pengembangan partai di Indonesia sekarang," kata Haryadi.[5]

---

[4] Siti Zuhro, ketika pendapatnya terkait perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-42, Sabtu (10/1/2015).

[5] PDIP Berpeluang Jadi Rujukan Partai Ideologis, Koran SINDO, Sabtu, 10 Januari 2015; http://nasional.sindonews.com/read/948718/149/pdip-berpeluang-jadi-rujukan-partai-ideologis-1420873322

:: pdip.doc

Megawati Soekarnoputri forum Internasional Conference of Asian Political Parties di Jakarta, April 2016 dimana PDI Perjuangan dan Partai Golkar bertindak sebagai tuan rumah.

Menurut Haryadi, ini relevan setidaknya untuk mengatasi kecenderungan pragmatisme partai politik di Indonesia. “Sebagai partai yang memerintah, tentu ini menjadi momentum bagi PDIP untuk mengoperasionalkan ideologi nasionalisme kewargaan/keindonesiaan menjadi ideologi yang bekerja. Tak cukup ideologi itu berhenti pada level retorik, tapi harus operasional dalam bentuk alternatif-alternatif kebijakan yang berorientasi publik warga-negara,” kata Haryadi.

Siti Zuhro menimpali mendorong PDIP untuk berani menjadi rujukan sebagai partai yang sukses melakukan kaderisasi internal. Menurut Siti, kesuksesan kaderisasi itu bisa terlihat dengan munculnya kader-kader seperti Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Sudah saatnya PDIP menunjukkan diri sebagai partai yang bisa dijadikan rujukan. PDIP sudah relatif berhasil, kadernya bagus-bagus, sukses merekrut kepala daerah yang orangnya yahud,” katanya.[6]

Keberhasilan PDI Perjuangan dalam memantapkan diri sebagai partai kader dan partai ideologis (pancasila) telah teruji melalui sejarah panjang yang dialami saat mendapat tekanan dari rezim otoriter Orde Baru. Hal ini membuat partai politik ini berbeda dengan parpol lainnya. PDI Perjuangan dalam konsistensinya sebagai partai ideologi telah menjadi pelopor perubahan sistem politik yang semakin demokratis yang menumbangkan pemerintahan otoriter Orde Baru.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, yang kini menjabat Mendagri menyebut perjuangan yang panjang itu hanya mungkin terjadi karena spirit perjuangan yang dilandaskan pada ideologi dan pemahaman terhadap nasionalisme. PDI Perjuangan merupakan partai yang khas dikenal dengan ciri utama pada konsolidasi ideologi yang dicirikan oleh pemahaman terhadap prinsip kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tjahjo menekankan hanya PDIP yang memiliki hal itu dibanding partai lain di Indonesia.

Dia menyebut, PDI Perjuangan juga memiliki ciri kuat, yakni keuletan Ibu Megawati Soekarnoputri, putri Proklamator Bung Karno, dalam melanjutkan ide, gagasan dan perjuangan Bung Karno.

Abdy Yuhana, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat[7] menulis Megawati Soekarnoputri, sangat ideologis, mampu sebagai perekat dan pemersatu serta teruji dalam memimpin partai dalam konfigurasi politik apapun. Sehingga partai di bawah kepemimpinannya tidak terbawa arus kepentingan politik yang sesaat. Dia menyebut pilihan untuk menjadi partai ideologis bagi PDI Perjuangan sangatlah tepat dalam kondisi kehidupan berbangsa dan berbangsa seperti saat ini. Di tengah kondisi maraknya politik pragmatis dan transaksional.

■ **crs-tim | TokohIndonesia.com**

[6] Ibid.

[7] Abdy Yuhana, Memperkokoh PDI Perjuangan Sebagai Partai Ideologis; http://pdiperjuangan-jabar.com/memperkokoh-pdi-perjuangan-sebagai-partai-ideologis.html

BUKU PILIHAN

personally selected books

ASISTEN ANDA
Dipilih oleh para pencinta buku

Toko online buku-buku pilihan,
buku klasik, dan buku langka.

TUHOR.COM

tuhor.id tuhorcom tuhorcom tuhorcom

BASUKI-DJAROT

Jakarta Baru

2

Kerja